



Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

LAKIP 2020

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat. Kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat diukur atas dasar penilaian indikator kinerja program yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran program sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2020.



“Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”

Jakarta, Desember 2020
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indra Gunawan', written over a light blue horizontal line.

Indra Gunawan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Karena Partisipasi Masyarakat sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, lembaga profesi dan dunia usaha.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2020 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. MAKSUD DAN TUJUAN	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI	1
1. Kedudukan	2
2. Tugas	2
3. Fungsi	2
4. Susunan Organisasi	2
C. SUMBER DAYA	5
D. SISTEMATIKA LAPORAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA).....	8
B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020	9
C. PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	13
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	52
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	56
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN	
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	60
2. RENCANA AKSI TAHUN 2020	73
3. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	91
4. FOTO KEGIATAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	SDM Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat berdasarkan Golongan Ruangan.....	5
Tabel 2.	SDM Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat berdasarkan Golongan Pendidikan.....	6
Tabel 3.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2020.....	9
Tabel 4.	Kegiatan dan Pendanaan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.....	9
Tabel 5.	Perbandingan anggaran tahun 2019 dan 2020.....	10
Tabel 6.	Perjanjian kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2020.....	10
Tabel 7.	Ringkasan Capaian kinerja Tahun 2020.....	12
Tabel 8.	Capaian Sasaran Program Kesatu (SP-1).....	17
Tabel 9.	Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.....	19
Tabel 10.	Lembaga Media yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.....	21
Tabel 11.	Organisasi Keagamaan Dan Organisasi Kemasyarakatan dan Akademisi yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.....	23
Tabel 12.	Capaian Sasaran Program Kedua (SP-2).....	24
Tabel 13.	Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang melakukan pencegahan perkawinan Anak	28
Tabel 14.	Lembaga Media yang melakukan pencegahan perkawinan anak.....	29
Tabel 15.	Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pencegahan perkawinan anak	32
Tabel 16.	Capaian sasaran program ketiga (SP-3).....	33
Tabel 17.	Capaian sasaran program keempat (SP-4) dengan Indikator Kinerja Sasaran (IKS-1).....	47
Tabel 18.	Capaian sasaran program keempat dan (SP-4) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kedua (IKS-2).....	52
Tabel 19.	Perubahan Anggaran Tahun 2020.....	56
Tabel 20.	Realisasi Anggaran Tahun 2020	56
Tabel 21.	Perkembangan Serapan Anggaran tahun 2018 dan 2020 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.....	56

BAB I PENDAHULUAN

Good governance merupakan syarat awal bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangandan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan itu, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Regulasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar tersebut, sebagai bagian dari instansi pemerintah, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat sebagai satuan kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menggunakan anggaran negara, setiap tahun wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Susunan Unit Organisasi Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat yang mempunyai Kedudukan, Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

- a. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- b. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

2. Tugas

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan peningkatan di bidang partisipasi masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi masyarakat;
- d. penyusunan data gender di bidang partisipasi masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang partisipasi masyarakat;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat;
- g. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B. SUSUNAN ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat membawahi tiga (3) Assisten Deputi dan 1 Sekteratis Deputi, sebagai berikut:

1. Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

- a. **mempunyai tugas** melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.
- b. **menyelenggarakan fungsi:**
 - 1) penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;

- 2) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat;
- 3) pengelolaan data dan pelaporan di lingkungan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat;
- 4) penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat;
- 5) pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat; dan
- 6) pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat.

2. Asisten Deputy Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha

- a. **Mempunyai tugas** melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha.
- b. **menyelenggarakan fungsi:**
 - 1) penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
 - 2) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
 - 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
 - 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha; dan
 - 5) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha.

3. Asisten Deputy Partisipasi Media

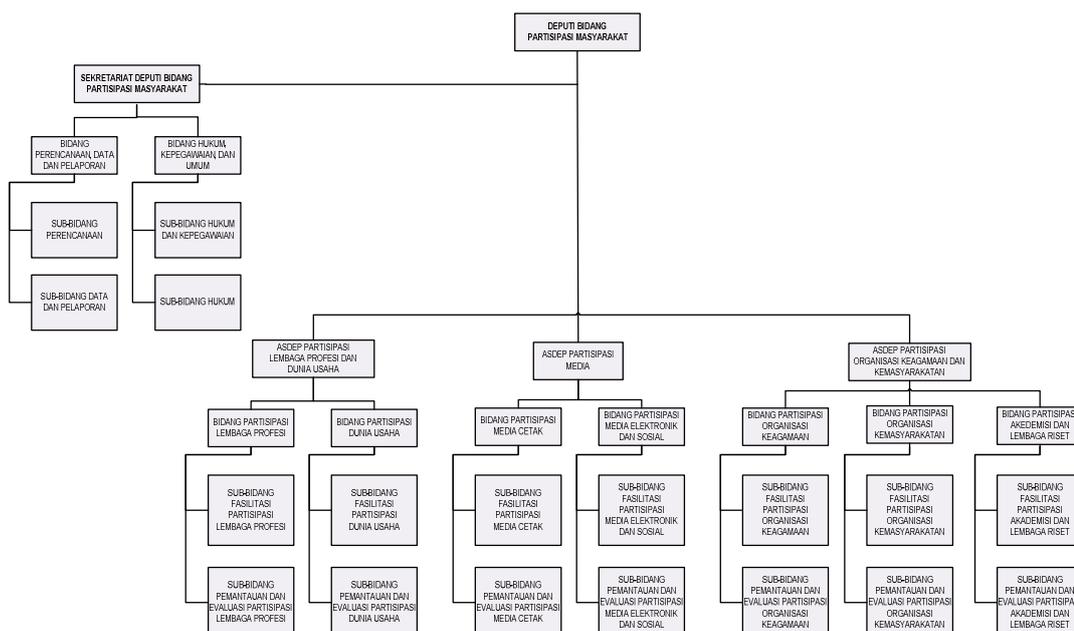
- a. **mempunyai tugas** melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi media.
- b. **menyelenggarakan fungsi:**

- 1) penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi media;
- 2) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi media;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi media;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi media; dan
- 5) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi media.

4. Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat

- a. **mempunyai tugas** melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi organisasi keagamaan dan masyarakat.
- b. **menyelenggarakan fungsi:**
 - 1) penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi organisasi keagamaan dan masyarakat;
 - 2) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi keagamaan dan masyarakat;
 - 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi organisasi keagamaan dan masyarakat;
 - 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi organisasi keagamaan dan masyarakat; dan
 - 5) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi keagamaan dan masyarakat.

Struktur organisasi Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat, sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 pada 4 Unit Kerja Eselon II sebanyak 35 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- SDM Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat berdasarkan Golongan Ruang, Golongan II sebanyak 2 (dua) orang, golongan III sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dan golongan IV sebanyak 11 (sebelas) orang. Sebaran SDM Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat berdasarkan Golongan Ruang di Unit kerja eselon II dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1. SDM Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat berdasarkan Golongan Ruang

NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN			JUMLAH
		II	III	IV	
1	Deputi bidang Partisipasi Masyarakat	-	-	1	1
2	Asisten Deputy Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	-	6	2	8
3	Asisten Deputy Partisipasi Media	-	7	2	9
4	Asisten Partisipasi Organisasi Keagamaan Dan Kemasyarakatan	-	5	3	8
5	Sekretariat Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	2	4	3	9
TOTAL		2	22	11	35

2. SDM Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat berdasarkan jenjang pendidikannya terdiri dari: S3 Sebanyak 1 Orang, S2 sebanyak 11 orang, S1/D4 sebanyak 23 orang, dan SLTA sebanyak 3 orang.

Tabel 2. SDM Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat berdasarkan Golongan Pendidikan

NO.	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	S1	S2	S3	
1	Deputi bidang Partisipasi Masyarakat	-		1	-	1
2	Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	1	4	3	-	8
3	Asisten Deputi Partisipasi Media	-	6	3	-	9
4	Asisten Partisipasi Organisasi Keagamaan Dan Kemasyarakatan	-	5	3	-	8
5	Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	2	5	1	1	9
TOTAL		3	20	11	1	35

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LKj Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2020, aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi, SDM, serta gambaran tugas dan fungsi Biro AKRB, struktur organisasi dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan gambaran rencana strategis Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat dan ikhtisar perjanjian kinerja Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis atas capaian kinerja Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis organisasi, yang ditunjang dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja serta akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari:

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Selain berfungsi sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kemen PPPA, dokumen ini juga menunjukkan peran Deputi PM dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra Kementerian Deputi PM Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Renstra Kemen PPPA yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Dengan demikian pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Deputi PM diharapkan mampu menjawab tantangan nasional bidang partisipasi masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut diantaranya mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia yaitu Membangun SDM

pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2020 dimulai sejak awal tahun 2019 yang mendasarkan pada RKP 2020 dan Renstra Kementerian. Selanjutnya dilakukan pembahasan dalam forum dialog kinerja yang merupakan forum perencanaan kinerja dan anggaran yang bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran periode sebelumnya, menyiapkan perumusan kegiatan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat tahun 2020. Hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan dalam forum Trilateral Meeting dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. DJA. Renja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2020 secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2020

SASARAN/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET
Meningkatnya partisipasi dan sinergitas Lembaga Profesi Dan Dunia Usaha, Media Dan Organisasi Agama Dan Kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
1. Jumlah lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan yang menerapkan kebijakan PPPA	49 Lembaga
2. Jumlah kegiatan sinergis lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan untuk peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	34 Provinsi
3. Jumlah Inovasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	15 Inovasi

(Sumber Krisna Tahun 2020)

Selanjutnya penyusunan anggaran Tahun 2020, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan *performance based budgeting* dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Program. Berdasarkan hasil pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. DJA, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat mendapat pagu anggaran sebesar Rp 12.500.000.00. Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 kegiatan yang terangkum dalam 1 program sebagai berikut:

Tabel 4 Kegiatan dan Pendanaan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

NO.	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1.	Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	2.500.000.000

2.	Partisipasi Media	2.500.000.000
3.	Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	4.500.000.000
4.	Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	3.000.000.000
	TOTAL	12.500.000.00

(Sumber DIPA Awal Tahun 2020 Deputi Bid. PM)

Dibandingkan tahun 2019, anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 19.383.970.000,-, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5 Perbandingan anggaran tahun 2019 dan 2020

KEGIATAN	ANGGARAN		NAIK/(TURUN)
	2019	2020	
1. Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	6.300.000.000	2.500.000.000	(3.800.000.000)
2. Partisipasi Media	6.500.000.000	2.500.000.000	(4.000.000.000)
3. Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	14.000.000.000	4.500.000.000	(9.500.000.000)
4. Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	5.083.970.000	3.000.000.000	(2.083.970.000)
TOTAL	31.883.970.000	12.500.000.00	(19.383.970.000)

(Sumber DIPA Awal Tahun 2019 dan 2020 Deputi Bid. PM)

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2020 telah disusun dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat dan Menteri PANRB. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (cascading) menjadi kinerja seluruh unit dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat berisi Indikator Kinerja Program (IKKP) yang mencakup sasaran, indikator kinerja, dan target sebagai berikut:

Tabel 6 Perjanjian kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam	Jumlah dunia usaha yang berperan serta dalam peningkatan pemberdayaan	30 Dunia Usaha

kewirausahaan	perempuan dalam kewirausahaan	
2. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah lembaga profesi dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	45 Lembaga
3. Pencegahan perkawinan anak	Jumlah lembaga profesi, media serta organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan pencegahan perkawinan anak	19 Lembaga
4. Peningkatan sinergi program dan kegiatan di lembaga masyarakat	1. Jumlah Provinsi yang melakukan sinergi program dan kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	34 Provinsi
	2. Jumlah inovasi sebagai hasil sinergi program dan kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan	15 Inovasi

(Sumber PK 2020 Deputi Bid. PM)

Untuk mendukung tercapainya perjanjian kinerja deputi bidang partisipasi masyarakat, telah dituangkan dalam sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja masing-masing eselon II.

Penandatanganan perjanjian kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat dilakukan pada bulan Januari 2020 yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural yang mencakup Eselon II, III dan IV yang isinya merupakan penjabaran dari IKP Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat. Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2020 disajikan dalam Lampiran-1.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Selain itu, pada Bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tahun 2020.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat tahun 2020 dinyatakan "berhasil", yaitu capaiannya apabila di rata-rata sebesar 90,8% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat tahun 2020 diukur berdasarkan capaian kinerja output/outcome atas 6 (enam) kegiatan yang dilaksanakan oleh para eselon II di lingkungan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat. Pencapaian kinerja program Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat tahun 2020 jika diukur dari Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Ringkasan Capaian kinerja Tahun 2020.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	Jumlah dunia usaha yang berperan serta dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	30 Dunia Usaha	28 Dunia Usaha	94%
2.	Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah lembaga profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan akademisi yang	45 Lembaga	48 Lembaga	107%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak			
3.	Pencegahan perkawinan anak	Jumlah lembaga profesi, media serta organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan pencegahan perkawinan anak	19 Lembaga	19 Lembaga	100%
4.	Peningkatan sinergi program dan kegiatan di lembaga masyarakat	1. Jumlah Provinsi yang melakukan sinergi program dan kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	34 Provinsi	34 Provinsi	100%
		2. Jumlah inovasi sebagai hasil sinergi program dan kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan	15 Inovasi	8 Inovasi	53 %

(Sumber PK 2020 Deputi Bid. PM)

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat menetapkan 4 (empat) sasaran program dengan 5 (lima) indikator program. Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing Sasaran Program Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Program (SP-1)

Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan

Program peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan adalah Program pertama dari 5 Program Prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dimana program ini merupakan bagian dari 7 Agenda Pembangunan

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Program ini bertujuan untuk lebih meningkatkan peran perempuan dalam memberdayakan seluruh potensi/kemampuan yang dimiliki oleh kaum perempuan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan itu sendiri khususnya untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga akan meningkatkan dan memperkuat ketahanan keluarga. Dalam hal ini, melibatkan serta mengajak pihak Dunia Usaha untuk dapat bersinergi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang lebih kita kenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).

Upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Dunia Usaha dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, antara lain melalui kegiatan:

1. Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan korban bencana banjir di Kab. Lebak, Banten, bekerjasama dengan APJI dan RKB Bank BRI. Jenis pelatihan adalah merajut, mengolah tanaman hidroponik, dan memasak.
2. Pendampingan Dunia Usaha Bagi Kelompok Perempuan Pelaku Ekonomi berupa Pelatihan Kuliner di Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB bekerjasama dengan IWAPI.
3. Pelatihan Pemasaran online dan Literasi Keuangan bersama Bank Mandiri, XL AXIATA, dan Rate-S.
4. Pelatihan Gizi Kerjasama PERSAGI & PERGIZI PANGAN
5. Pemberian Bantuan Spesifik Perempuan dan Anak dalam rangka Pengentasan Pandemi Covid-19 pada tanggal 17 Mei 2020. Ada 14 dunia usaha yang berpartisipasi yakni:
 - a. Asosiasi Duta Indonesia;
 - b. Wanita Panutan Indonesia;
 - c. Frisian Flag Indonesia;
 - d. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk;
 - e. PT. Nestle Indonesia;
 - f. Kalbe Consumer Health;
 - g. PT. Nutrifood Indonesia;
 - h. DANONE INDONESIA;
 - i. PT. Kimia Farma Tbk;
 - j. PT. Mustika Ratu Tbk;

- k. PT. Unilever Indonesia Tbk;
 - l. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI);
 - m. Tanoto Foundation;
 - n. Kamar Dagang Indonesia (KADIN).
6. Pemberian Bantuan Spesifik Perempuan dan Anak dalam rangka Hari Lahir Pancasila pada tanggal 01 Juni 2020. Sebanyak 6 dunia usaha yang berpartisipasi yakni:
- a. PT. Nestle Indonesia;
 - b. PT. Mustika Ratu Tbk;
 - c. PT. Unilever Indonesia Tbk;
 - d. PT. XL Axiata;
 - e. KADIN;
 - f. PT. Softex Indonesia.
7. Pemberian Bantuan Spesifik Perempuan dalam rangka Hari Pekerja Rumah Tangga pada tanggal 16 Juni 2020. Sebanyak 4 dunia usaha yang berpartisipasi yakni:
- a. PT. Nestle Indonesia;
 - b. PT. Mustika Ratu Tbk;
 - c. PT. XL Axiata;
 - d. PT. Softex Indonesia.
8. Pemberian Paket Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Anak dalam rangka Rangkaian Hari Anak Nasional pada 11 Juli 2020. Sebanyak 9 dunia usaha yang berpartisipasi yakni:
- a. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk;
 - b. PT. Nestle Indonesia;
 - c. PT. Monde Biscuit Indonesia;
 - d. Kalbe Nutrition;
 - e. Prudential;
 - f. PT. P&G;
 - g. Bank BNI;
 - h. Bank Mandiri.
9. Asistensi dan Pendampingan Dunia Usaha bagi kelompok Perempuan Pelaku Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12-13 November 2020 berupa Pelatihan Menjahit, Pelatihan Memasak, Pelatihan Hidroponik, Pelatihan Pertukangan dan Pelatihan Manajemen Usaha. Adapun Dunia Usaha yang berpartisipasi adalah IWAPI, Bank Tabungan Negara (BTN) serta PT. Telkom Indonesia Tbk.

10. Workshop Dunia Usaha untuk peningkatan Ekonomi Perempuan (Best Practice CSR) pada 23 November 2020. Adapun Dunia Usaha yang menjadi Narasumber adalah Pertamina Foundation, PT. Frisian Flag Indonesia dan PT. Astra International, Tbk. Dalam workshop ini, dunia usaha saling berbagi program CSR mereka dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11. Asistensi dan Pendampingan Dunia Usaha bagi kelompok perempuan pelaku ekonomi di Provinsi Aceh pada tanggal 26 November 2020 berupa Pelatihan Menjahit, Pelatihan Pengelolaan Hasil Laut, Pelatihan Hidroponik serta Pelatihan Manajemen Usaha. Adapun Dunia Usaha yang berpartisipasi adalah IWAPI dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
12. Pemberian bantuan bagi Anggota Wirawati Catur Panca sebanyak 9 (sembilan) kursi roda dan 5 (lima) kacamata baca. Penerima bantuan adalah kaum perempuan pejuang angkatan tahun 1945 yang telah berusia lanjut. Pemberian bantuan ini dalam rangka Rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-92 tahun 2020. Pihak dunia usaha yang berpartisipasi adalah PT.Kimia Farma Tbk.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah adanya refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 serta adanya perubahan metode/sistem kerja dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan yang menyesuaikan kondisi saat ini yaitu dengan daring yang tentu saja berpengaruh pada sasaran dan target program serta luring dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, serta kebijakan dari pihak dunia usaha, dimana para perusahaan menyesuaikan dengan kondisi pandemic Covid-19.

Untuk selanjutnya, langkah yang akan diambil adalah pelaksanaan audiensi/pertemuan terbatas antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemnagku jabatan tertinggi di dunia usaha atau Chief Excecutive Officer (CEO). Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha untuk lebih merangkul pihak dunia usaha dalam upaya mensinergikan dan mengarusutamakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai salah satu program prioritas CSR pihak Dunia Usaha

Sasaran Program kesatu yaitu "Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan" dengan capaian indikator sasaran "Jumlah dunia usaha yang berperan serta dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan", sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian Sasaran Program Kesatu (SP-1)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	Jumlah dunia usaha yang berperan serta dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	30 Dunia Usaha	28 Dunia Usaha	94%

Sasaran Program “Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan” mempunyai target 30 Dunia Usaha. Target tersebut tercapai sekitar 94% atau sebanyak 28 Dunia Usaha yang berperan serta dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan

Sasaran Program (SP-2)

Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Program Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak merupakan Program ke-tiga dalam 5 Program Prioritas Kemen PPPA. Dalam upaya untuk mendukung tercapainya program ini, maka upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, adalah berupaya untuk menyamakan persepsi, mengarusutamakan isu perlindungan perempuan dan anak melalui sinergitas dengan Lembaga Profesi yang ada, serta berupaya meningkatkan partisipasi Lembaga Profesi dalam upaya Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Sehingga pada akhirnya, tujuan dari program ini adalah terjalinnnya koordinasi, sinergi, persamaan persepsi, komitmen yang kuat serta adanya partisipasi dari Lembaga Profesi untuk mendukung program Kemen PPPA dalam upaya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hingga akhir tahun 2020, sebanyak 15 Lembaga Profesi telah bergabung dalam Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak (PROSAPENA), dan bersama Asisten Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Edukasi terkait “Penurunan KDRT dan Eksploitasi Anak” dengan sasaran Kelompok Perempuan Pelaku Ekonomi di Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, bekerjasama dengan IWAPI dan Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Prov. NTB
2. Pembuatan materi KIE kolaborasi dengan Lembaga Profesi dalam menghadapi Pandemi Covid-19. (Perlindungan Perempuan dan Anak)

3. Pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak saat Pandemi Covid-19 Kolaborasi dengan Dunia Usaha.
4. Workshop Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Profesi secara daring/online. Kegiatan dilaksanakan secara beruntun, dimulai pada tanggal 15 September hingga tanggal 23 Oktober 2020. Sasaran dari Workshop ini adalah sumber daya manusia (SDM) lembaga profesi terkait. Narasumber dari Pakar Profesi tergabung dalam Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak (PROSAPENA), antara lain:
 - a. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tanggal 14 Oktober 2020
 - b. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) tanggal 13 Oktober 2020
 - c. Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) tanggal 15 September 2020
 - d. Ikatan Konselor Indonesia (IKI) tanggal 6 Oktober 2020
 - e. Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) tanggal 1 Oktober 2020
 - f. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI LUHUT) tanggal 20 Oktober 2020
 - g. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI OTTO) tanggal 23 Oktober 2020
 - h. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) tanggal 15 Oktober 2020
 - i. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) tanggal 16 Oktober 2020
 - j. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tanggal 18 September 2020
 - k. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tanggal 29 September 2020
 - l. Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) tanggal 8 Oktober 2020
 - m. Junior Doctor Network Indonesia (JDNI) tanggal 17 September 2020
 - n. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) tanggal 30 September 2020
 - o. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) tanggal 7 Oktober 2020
5. Fasilitasi Advokasi Informasi dan Focus Group Discussion (FGD) Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagi Lembaga Profesi Via Zoom Meeting. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan fokus isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masing-masing bidang yang ada dalam Forum PROSAPENA.
 - a. Bidang Pendidikan pada 21 November 2020
 - b. Bidang Kesehatan pada 19 November 2020
 - c. Bidang Hukum pada 22 November 2020

Adapun kendala yang dihadapi yakni keterbatasan pelaksanaan kegiatan karena harus dilaksanakan secara luring dikarenakan Pandemi Covid-19, Rencana tindak lanjut yang kedepan adalah menambah 1 (satu) bidang lagi yaitu bidang Media sebagai salah

satu pintu masuk dalam upaya mendukung penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jumlah lembaga profesi dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti terlampir di table bawah ini.

Tabel 9 Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah lembaga profesi dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	12 Lembaga	15 Lembaga	125%

Lembaga profesi dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak mempunyai target 6 Lembaga Media. Target tersebut tercapai sekitar 125% atau 15 Lembaga Media yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam mendukung Program Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang merupakan Program ke-tiga dalam 5 Program Prioritas Kemen PPPA. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat berupaya untuk menyamakan persepsi, mengarusutamakan isu perlindungan perempuan dan anak melalui sinergitas dengan Lembaga Media yang ada. Upaya ini juga dilakukan untuk mendorong partisipasi Lembaga Media untuk berkomitmen dalam Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Lembaga media (baik media cetak, elektronik atau media siaran) yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain melalui kegiatan:

1. Diskusi Daring Pegiat Media Sosial Indonesia Tentang Melindungi Anak dari Kejahatan Seksual di Internet melalui Zoom Meeting.

Perkembangan internet yang begitu massif saat ini, punya dampak positif dan negatif bagi masyarakat, terutama anak-anak. Anak-anak sebagai generasi naif namun paling cepat mempelajari teknologi, rentan terpapar dampak negatif penggunaan internet, di antaranya kejahatan seksual. Oleh karena itu, perlu partisipasi masyarakat pengguna media sosial untuk memberikan perlindungan kepada anak dari kejahatan seksual di internet.

2. Webinar Perempuan dalam Bingkai Media

Media kadang bias dalam mempersonifikasikan perempuan yang disajikan dalam pemberitaan baik di media cetak maupun di media online. Tubuh perempuan menjadi alat persuasif yang digunakan untuk menjual berbagai komoditi dalam upaya membawa daya tarik pada suatu produk. Media lebih menfokuskan pada aspek privat perempuan sebagai obyek berita, aspek intim perempuan dianggap sebagai kesenangan atau kenikmatan sebagai sisi kehidupan pribadi perempuan yang banyak dijadikan konsumsi media.

Untuk mewujudkan media yang lebih responsif kepada gender, Deputi bidang Partisipasi Masyarakat memberikan webinar tentang bagaimana seharusnya media menghasilkan produk yang adil gender.

3. Webinar Perundungan Dunia Maya dan Eksploitasi Seksual di Media Sosial

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, orang tua dan pegiat media sosial di Indonesia dalam pengarusutamaan hak anak dan perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia. Selain itu untuk meningkatkan strategi melindungi anak dari kejahatan seksual di dunia maya/internet.

4. Webinar Siaran Televisi Ramah untuk Anak

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan media sebagai produsen dalam memilih, memilah, mengonsumsi dan mem-filter berbagai tayangan televisi untuk anak. Dengan kemampuan memilah tayangan televisi secara sehat anak Indonesia terlindungi dari hal-hal negatif yang ditayangkan media.

5. Bimbingan Teknis bagi SDM Media tentang Pemantauan Pemberitaan Ramah Anak

Kegiatan ini mendorong peran aktif lembaga media untuk memproduksi pemberitaan yang ramah dan melindungi hak-hak anak. Selain lembaga media, kegiatan ini juga melibatkan masyarakat untuk memantau pemberitaan yang masih melanggar pedoman pemberitaan ramah anak dan melaporkannya kepada dewan pers, sebagai lembaga yang punya wewenang memberikan sanksi dan teguran kepada media.

Dari kegiatan ini, Dewan Pers mendapatkan banyak informasi, laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang adanya pemberitaan media yang masih menyalahi pedoman pemberitaan ramah anak.

6. Bimbingan Teknis bagi SDM Media tentang Penulisan Responsif gender dan Ramah Anak

Melalui kegiatan ini diharapkan lembaga media mampu memproduksi tulisan yang responsif gender dan ramah anak.

Dalam pelaksanaannya sebagian besar kegiatan dilaksanakan secara online sehingga kurang optimal, rentan mengalami gangguan terkait koneksi jaringan internet, meskipun jumlah lembaga media yang terlibat lebih banyak, namun tidak menjamin substansi tercapai sesuai yang diharapkan.

Jumlah Lembaga Media yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti terlampir di table bawah ini.

Tabel 10 Lembaga Media yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah lembaga media yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	6 Lembaga	6 Lembaga	100 %

Lembaga Media yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak mempunyai target 6 Lembaga Media. Target tersebut tercapai sekitar 100% atau 6 Lembaga Media yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mendukung tercapainya program penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, adalah menyamakan persepsi, mengarusutamakan isu perlindungan perempuan dan anak melalui sinergitas, dan meningkatkan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan serta akademisi/lembaga riset yang ada untuk bersama-sama mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga pada akhirnya, dapat mendukung program Kemen PPPA dalam upaya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat untuk melalui kegiatan:

1. Sosialisasi Pesantren Ramah Anak di 5 Provinsi (Jateng, Sumbar, Aceh, Jabar, Sumsel).



2. Sosialisasi Panduan Perguruan Tinggi Responsif Gender di Provinsi Sumatera Utara tgl 20 Februari 2020
3. Sosialisasi Pencegahan FGM/C/P2GP/Sunat Perempuan di Indonesia tgl 28 September 2020
4. Sosialisasi Pencegahan Sunat Perempuan (FGM/G/P2GP) di Indonesia tgl 19 Oktober 2020
5. Sosialisasi PUG dan PUHA bagi Akademisi/Lembaga Riset tentang PTRG di masa Pandemi, 18 September 2020
6. Sosialisasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia bagi organisasi keagamaan pada tanggal 20 oktober 2020.



7. Pelatihan/Pendampingan dan Pengembangan Pesantren Ramah Anak di 5 Provinsi.



8. Workshop Sinergi Bagi Organisasi Keagamaan Muslimat NU dalam rangka Pencegahan Sunat Perempuan di Depok, tgl 26-27 Februari 2020



9. Penguatan Peran PSW/PSG/A dlm Upaya Penerapan Kampus Responsif Gender (Loka Latih tentang Psychological First Aid) tgl 25-28 Agustus 2020

Kendala dari kegiatan offline adalah target yang diharapkan tidak maksimal karena kondisi pandemi, sedangkan kendala untuk kegiatan online adalah jaringan koneksi internet yang tidak stabil serta sarasannya yang kurang efektif dari sisi fokus konsentrasi peserta terhadap pelaksanaan kegiatan online/daring.

Jumlah organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan akademisi yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti terlampir di table bawah ini.

Tabel 11 Organisasi Keagamaan Dan Organisasi Kemasyarakatan dan Akademisi yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan akademisi yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	27 Lembaga	27 Lembaga	100%

Organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan akademisi yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak mempunyai target 27 organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan akademisi. Target tersebut tercapai sekitar 100% atau 27 organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan akademisi yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada Sasaran Program ketiga "Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak" dengan capaian indikator sasaran "Jumlah lembaga profesi dan dunia usaha, media, serta organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan akademisi yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak", seperti terlampir di table bawah ini.

Tabel 12 Capaian Sasaran Program Kedua (SP-2)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah lembaga profesi dan dunia usaha, media, serta organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan akademisi yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	45 Lembaga	48 Lembaga	107%

Sasaran Program "Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak" mempunyai target 45 lembaga profesi dan dunia usaha, media, serta organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan akademisi. Target tersebut tercapai sekitar 125% atau 15 lembaga profesi dan dunia usaha, media, serta organisasi

keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan akademisi yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sasaran Program (SP-3)

Pencegahan perkawinan anak

Perkawinan anak masih menjadi masalah serius yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa angka pernikahan usia anak di Indonesia tertinggi ketujuh di dunia dan nomor dua se-ASEAN (Bomantama, 2018). Data Badan Pusat Statistik tahun 2017 menunjukkan sebaran angka perkawinan anak berada di atas 25 persen. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan untuk merevisi Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana UU tersebut menyebutkan bahwa usia minimal menikah untuk perempuan adalah 16 tahun, sementara [UU Perlindungan Anak tahun 2002](#) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian hingga bisa merugikan anak. Anak harus dilindungi tumbuh kembang dan hak-haknya agar terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijamin oleh Konstitusi dan Undang-undang Perlindungan Anak maupun Konvensi Hak Anak (KHA).

Definisi perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh individu yang berusia di bawah usia 18 tahun. Definisi ini mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan bahwa batasan bagi usia anak adalah 18 tahun (Mulia, 2018). Indonesia sudah masuk dalam kondisi 'Darurat Perkawinan Anak' yang membuat banyak anak kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara (Safitri, 2018). Sejatinya, perkawinan anak bisa terjadi karena banyak masalah sosial budaya yang belum terselesaikan. Salah satunya, kondisi ketimpangan gender di masyarakat yang menempatkan perempuan di posisi yang harus menuruti bila diminta orangtua untuk menikah di usia anak sekalipun. Kemudian, rendahnya pengetahuan tentang risiko kesehatan terkait reproduksi dan sebagainya yang terjadi akibat perkawinan muda.

Sejumlah penelitian (dikutip dalam Mulia, 2018), menemukan berbagai dampak buruk perkawinan anak. Pertama, perkawinan anak memicu tingginya AKI (Angka Kematian Ibu) setelah melahirkan, disebabkan oleh ketidaksiapan fungsi reproduksi Ibu secara biologis dan psikologis. Anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun dibanding kehamilan pada Ibu usia dewasa. Kedua,

angka kematian bayi juga lebih tinggi. 14% bayi dari ibu berusia di bawah 17 tahun terlahir premature karena salah satu masalah yang seringkali dialami oleh remaja adalah anemia. Hal ini meningkatkan kemungkinan anak tersebut mengalami hambatan pertumbuhan (stunting) sebanyak 30%-40%. Ketiga, perkawinan anak merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian di masyarakat. Di Indonesia, angka perceraian bagi yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan yang menikah di usia dewasa. Selain itu, berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia Indonesia karena jadi salah satu pemicu anak putus sekolah. Terakhir, perkawinan anak memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akibat belum dicapainya kedewasaan emosional.

Melihat begitu banyaknya masalah yang diakibatkan oleh perkawinan anak, sudah sepantasnya praktik ini dijadikan perhatian dan tak dimaklumi. Perkawinan membutuhkan kedewasaan dan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga psikologis, sosial, mental dan spiritual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk dalam fenomena perkawinan anak. Pencegahan perkawinan anak termasuk satu dari lima arahan prioritas presiden yang harus dilaksanakan oleh KemenPPPA.

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat yang merupakan salah satu kedeputian di KemenPPPA akan berupaya mengedukasi masyarakat termasuk melibatkan laki-laki untuk membantu mencegah perkawinan anak, sehingga diharapkan angka perkawinan anak dapat mengalami penurunan yang signifikan.

Upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat melalui Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, untuk meningkatkan [partisipasi lembaga profesi](#) yang melakukan [pencegahan perkawinan anak](#), antara lain melalui kegiatan:

1. Menghimpun pandangan dan masukan dari dari Lembaga Profesi (Prosapena) terkait isu tradisi "kawin tangkap" di daerah Sumba NTB.
2. Pendampingan Dunia Usaha Bagi Kelompok Perempuan Pelaku Ekonomi (IWAPI) dan Perhimpunan Hotel Restaurant Indonesia di Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. (peningkatan ekonomi mencegah dan mengurangi perkawinan usia anak)

3. Terbentuknya Bidang Perempuan dan Anak dalam Organisasi Lembaga Profesi serta Kajian dan Kegiatan yang mendorong Pencegahan perkawinan usia anak. Adapun Lembaga Profesi tersebut antara lain:
 - a. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DR. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M;
 - b. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Otto Hasibuan;
 - c. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);
 - d. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI);
 - e. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
 - f. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI);
 - g. Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
 - h. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI);
 - i. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI);

4. Kolaborasi pembuatan materi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Lembaga Profesi. Diseminasi informasi dengan menyertakan informasi mengenai Kebijakan PPPA dari berbagai sudut pandang Profesi. Seluruh KIE telah selesai dibuat, dan softfile seluruh KIE dapat diakses pada <http://bit.ly/KIESINERGILP>. Kolaborasi KIE dilaksanakan bekerja sama dengan seluruh anggota Prosapena, yaitu:
 - a. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);
 - b. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII);
 - c. Asosiasi Dosen Indonesia (ADI);
 - d. Ikatan Konselor Indonesia (IKI);
 - e. Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI);
 - f. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI Pimpinan LUHUT);
 - g. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI Pimpinan Otto);
 - h. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
 - i. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI);
 - j. Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
 - k. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI);
 - l. Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI);
 - m. Junior Doctor Network Indonesia (JDNI);
 - n. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI);
 - o. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

Jumlah Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang melakukan pencegahan perkawinan anak, seperti terlampir di table bawah ini.

Tabel 13 Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang melakukan pencegahan perkawinan anak

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Pencegahan perkawinan anak	Jumlah Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang melakukan pencegahan perkawinan anak	6 Lembaga	6 Lembaga	100%

Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang melakukan pencegahan perkawinan anak mempunyai target 6 Lembaga Profesi dan Dunia Usaha. Target tersebut tercapai sekitar 100% atau 6 Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang melakukan pencegahan perkawinan anak.

Upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi lembaga media yang melakukan pencegahan perkawinan anak, antara lain melalui kegiatan Webinar “Aksi Bersama Pencegahan Perkawinan Usia Anak” kegiatan akan melibatkan kepada tokoh masyarakat, insan media, forum anak dan pemerintah.

Lembaga media yang melakukan pencegahan perkawinan anak, antara lain:

1. Jaringan Radio Komunitas
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
3. Forum Jurnalistik Perempuan Indonesia (FJPI)
4. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
5. Dewan Pers
6. Asosiasi Jurnalistik Indonesia (AJI)
7. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Tujuan:

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, insan media dan pemerintah untuk bersama melakukan pencegahan perkawinan anak.

Output:

Output atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya kesadaran dan kepedulian sehingga terbentuk sinergi antara masyarakat, media dan pemerintah untuk

menurunkan angka perkawinan anak melalui berbagai metode dan strategi berbasis masyarakat.

Jumlah lembaga media yang melakukan pencegahan perkawinan anak, seperti terlampir di table bawah ini.

Tabel 14 Lembaga Media yang melakukan pencegahan perkawinan anak

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Pencegahan perkawinan anak	Jumlah lembaga media yang melakukan pencegahan perkawinan anak	6 Lembaga	6 Lembaga	100%

Lembaga Media yang melakukan pencegahan perkawinan anak mempunyai target 6 Lembaga Media. Target tersebut tercapai sekitar 100% atau 6 Lembaga Media yang berpartisipasi dalam pencegahan perkawinan anak.

Upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan pencegahan perkawinan anak, antara lain melalui kegiatan:

1. Sosialisasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia bagi organisasi keagamaan pada tanggal 20 oktober 2020. Mengundang 25 Lembaga Keagamaan

Maksud dan Tujuan:

- a. mensosialisasikan isu perkawinan Anak kepada seluruh organisasi keagamaan di Indonesia
- b. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan organisasi keagamaan terhadap upaya pencegahan perkawinan anak;
- c. mengedukasi pemahaman organisasi keagamaan tentang bahaya perkawinan anak.

Output:

- a. tersosialisasinya isu perkawinan anak kepada seluruh organisasi keagamaan;
- b. meningkatnya pemahaman dan pengetahuan organisasi perempuan terhadap upaya pencegahan perkawinan anak; dan
- c. teredukasinya pemahaman organisasi keagamaan tentang bahaya perkawinan anak.



2. Sosialisasi Pencegahan Sunat Perempuan dan Pencegahan perkawinan Anak bersama Organisasi Dharma Wanita Persatuan pada tanggal 19 oktober 2020 melalui daring.

Maksud dan Tujuan:

- a. Mensosialisasikan isu sunat perempuan dan perkawinan Anak kepada Seluruh anggota Organisasi DWP ditingkat pusat maupun daerah.
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Seluruh anggota Organisasi DWP ditingkat pusat maupun daerah terhadap upaya pencegahan sunat perempuan dan perkawinan anak;
- c. Mengedukasi pemahaman Seluruh anggota Organisasi DWP ditingkat pusat maupun daerah tentang bahaya sunat perempuan dan perkawinan anak.

Output :

- a. Tersosialisasinya isu sunat perempuan dan perkawinan Anak kepada Seluruh anggota Organisasi DWP ditingkat pusat maupun daerah.
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Seluruh anggota Organisasi DWP ditingkat pusat maupun daerah terhadap upaya pencegahan sunat perempuan dan perkawinan anak;
- c. Teredukasinya pemahaman Seluruh anggota Organisasi DWP ditingkat pusat maupun daerah tentang bahaya sunat perempuan dan perkawinan anak.



3. Sosialisasi PUG dan PUHA Bagi Akademisi Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Lombok Tengah tgl 24 Agustus 2020

Maksud dan Tujuan:

- a. mensosialisasikan isu perkawinan Anak kepada Akademisi/Lembaga Riset di Lombok Tengah
- b. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Akademisi/Lembaga Riset di Lombok Tengah terhadap upaya pencegahan perkawinan anak;
- c. mengedukasi pemahaman Akademisi/Lembaga Riset di Lombok Tengah tentang bahaya perkawinan anak.

Output :

- a. tersosialisasinya isu perkawinan anak kepada Akademisi/Lembaga Riset di Lombok Tengah;
- b. meningkatnya pemahaman dan pengetahuan Akademisi/Lembaga Riset di Lombok Tengah terhadap upaya pencegahan perkawinan anak; dan
- c. teredukasinya pemahaman Akademisi/Lembaga Riset di Lombok Tengah tentang bahaya perkawinan anak.



Kendala dari kegiatan offline adalah target yang diharapkan tidak maksimal karena kondisi pandemi, sedangkan kendala untuk kegiatan online adalah jaringan koneksi internet yang tidak stabil serta sasarannya yang kurang efektif dari sisi fokus konsentrasi peserta terhadap pelaksanaan kegiatan online/daring.

Jumlah [Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan](#) yang melakukan pencegahan perkawinan anak, seperti terlampir di table bawah ini.

Tabel 15 [Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pencegahan perkawinan anak](#)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Pencegahan perkawinan anak	Jumlah organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan pencegahan perkawinan anak	10 Lembaga	10 Lembaga	100%

[Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan](#) yang melakukan pencegahan perkawinan anak mempunyai target 10 organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Target tersebut tercapai sekitar 100% atau 10 organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.

Pada Sasaran Program ketiga “[Pencegahan perkawinan anak](#)” dengan capaian indikator sasaran “[Jumlah lembaga profesi, media serta organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan pencegahan perkawinan anak](#)”, seperti terlampir di table bawah ini.

Tabel 16 Capaian sasaran program ketiga (SP-3)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Pencegahan perkawinan anak	Jumlah lembaga profesi, media serta organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan pencegahan perkawinan anak	19 Lembaga	19 Lembaga	100%

Sasaran Program "Pencegahan perkawinan anak" mempunyai target 19 lembaga (lembaga profesi, lembaga media serta organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan) yang melakukan pencegahan perkawinan anak. Target tersebut dapat tercapai 100%.

Sasaran Program (SP-4)

Peningkatan sinergi program dan kegiatan di lembaga masyarakat

Pada Sasaran Program empat "Peningkatan sinergi program dan kegiatan di lembaga masyarakat" mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program, dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Sasaran (IKS-1): "Jumlah Provinsi yang melakukan sinergi program dan kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak".

Pandemi covid 19 mempengaruhi berbagai sektor riil dalam kehidupan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi. Ruang gerak yang terbatas menyebabkan berbagai sektor kehidupan terpengaruh dengan signifikan. Sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan merupakan sektor yang mengalami imbas secara langsung. Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok rentan dan paling mudah terdampak pada masa pandemi ini.

Kerentanan sosial yang terjadi dapat memicu tingkat kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan.

Dalam kondisi seperti saat ini dibutuhkan peran serta seluruh masyarakat untuk saling bahu membahu membangun pertahanan diri dan lingkungan.

Lembaga masyarakat sebagai katalis dalam lingkungan yang lebih luas memerlukan stimulasi untuk mengembangkan potensinya dalam rangka peningkatan perlindungan

dan pemberdayaan perempuan, sehingga dibutuhkan sarana pengembangan diri dalam bentuk penambahan ilmu dan wawasan melalui berbagai kegiatan diskusi, seminar ataupun workshop terkait peran lembaga masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Dalam upaya mencapai program pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergitas Pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat termasuk lembaga profesi dan dunia usaha. Isu perempuan dan anak merupakan masalah lintas sektoral (cross cutting issue). Ini berarti masalah perempuan dan anak berada di berbagai bidang pembangunan. Dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Maka daripada itu, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat melalui Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha berupa untuk terus menjalin hubungan baik dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga profesi dan dunia usaha agar dapat bersinergi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, untuk mendorong Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah tingkat provinsi untuk melakukan sinergi program dan kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain melalui kegiatan:

Sinergi Program Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam rangka Menyongsong Tata Kehidupan Normal Baru dengan target PUSPA dari 12 Provinsi binaan Asdep LPDU. Adapun Pelaksanaannya terbagi menjadi 4 kegiatan, yakni:

- a. Fasilitasi Sinergi Webinar Menyongsong Tatanan Kehidupan Normal Baru (New Normal) Bersama Pakar Profesi Seri Kesehatan tanggal 20 Juli 2020.
- b. Fasilitasi Sinergi Webinar Menyongsong Tatanan Kehidupan Normal Baru (New Normal) Bersama Pakar Profesi Seri Pendidikan tanggal 22 Juli 2020.
- c. Fasilitasi Sinergi Webinar Menyongsong Tatanan Kehidupan Normal Baru (New Normal) Bersama Pakar Profesi Seri Hukum tanggal 24 Juli 2020.
- d. Fasilitasi Sinergi Webinar Menyongsong Tatanan Kehidupan Normal Baru (New Normal) Bersama Pakar Profesi Seri Ekonomi tanggal 9 September 2020.

Pelaksanaan Sinergi dengan PUSPA Provinsi binaan asdep LPDU dengan Substansi yang disampaikan (1) Sosialisasi Protokol Kesehatan Keluarga; (2) Program dan kebijakan terkait PP dan PA. Adapun Provinsi yang menjadi target sasaran:

- a. Forum PUSPA Provinsi Riau tanggal 16 November 2020;
- b. Forum PUSPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 19 November 2020;
- c. Forum PUSPA Provinsi Jawa Timur tanggal 23 November 2020;
- d. Forum PUSPA Provinsi DI Yogyakarta tanggal 17 November 2020;
- e. Forum PUSPA Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 November 2020;
- f. Forum PUSPA Provinsi Kalimantan Utara tanggal 10 November 2020;
- g. Forum PUSPA Provinsi Kalimantan Barat tanggal 24 November 2020;
- h. Forum PUSPA Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 November 2020;
- i. Forum PUSPA Provinsi Gorontalo tanggal 17 November 2020;
- j. Forum PUSPA Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 November 2020;
- k. Forum PUSPA Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 24 November 2020;
- l. Forum PUSPA Provinsi Maluku Utara tanggal 26 November 2020;

Adapun kendala yang dihadapi yakni keterbatasan pelaksanaan kegiatan dan harus dilaksanakan secara luring dikarenakan Covid-19. Adapun rencana tindak lanjut adalah untuk terus melakukan upaya penguatan materi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masing-masing 12 PUSPA yang merupakan wilayah binaan Asdep LPDU dengan melibatkan Lembaga Profesi dan PUSPA tentunya.

Upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, untuk mendorong Provinsi dalam melakukan sinergi program dan kegiatan [lembaga media](#) dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan, antara lain melalui kegiatan antara lain melalui kegiatan Webinar "pelatihan dalam peningkatan pendapatan keluarga dimasa Pandemi" kegiatan akan melibatkan kepada tokoh masyarakat, insan media, forum anak dan pemerintah. Lembaga media yang melakukan Sinergi, antara lain:

1. Jaringan Radio Komunitas
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
3. Forum Jurnalistik Perempuan Indonesia (FJPI)
4. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
5. Dewan Pers
6. Asosiasi Jurnalistik Indonesia (AJI)
7. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Tujuan Penyelenggaraan kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatkan peran PUSPA Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten;
- b. Orang tua khususnya ibu memiliki kemampuan dalam mengasuh dan mendidik anak dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui

parenting skill. Parentin skill diprioritaskan terkait tips belajar dari rumah bersama orang tua;

- c. Untuk mengatasi penurunan pendapat keluarga karena masa pandemi, dilaksanakan webinar tentang "strategi bisnis pada masa pandemi covid 19" .

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran PUSPA Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten;
- b. Meningkatkan peran serta orang tua dalam proses belajar dari rumah secara efektif dan menyenangkan;
- c. Menghidupkan kembali usaha rumah tangga yang terdampak pandemi covid 19

Upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat untuk mendorong Provinsi dalam melakukan sinergi program dan kegiatan [organisasi agama dan kemasyarakatan](#) dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan, antara lain melalui kegiatan:

- a. Workshop Sinergi bagi organisasi Keagamaan bersama muslimat NU drk. Pencegahan sunat Perempuan di Depok, Jawa Barat 26-27 Februari 2020

- 1) Maksud dan Tujuan: dalam upaya memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, Kementerian PPPA secara bertahap melakukan sosialisasi kepada mitra KemenPPPA baik dipusat maupun di daerah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya FGM/C/P2GP

- 2) Output: meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan FGM/C/P2GP

- 3) Foto:



- b. Fasilitasi sinergi akademisi/lembaga riset dalam rangka PPPA bersama Forum Puspa **Kalsel** tanggal 12, 16, 19 september 2020

- 1) Maksud dan Tujuan: Memberikan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan kepada santri(wati), masyarakat sekitar, ibu rumah tangga, Ustadz(ah), dsb.

3) Foto:



d. Fasilitasi Sinergi Akademisi/Lembaga Riset Dalam Rangka PPPA Bersama Forum PUSPA **Aceh** pada tanggal 21, 28 September, 1 Oktober 2020, Meliputi kegiatan: Penguatan Kapasitas Forum PUSPA Provinsi dan Kab/Kota, Pelatihan Kepemimpinan Perempuan di Akar Rumput, Pelatihan Branding dan Pemasaran Hasil industri Rumahan

1) Maksud dan Tujuan:

- a) Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan dan pengetahuan perempuan di Akar Rumput.
- b) Memberikan edukasi tentang perempuan dalam berwirausaha memasarkan hasil industri rumahan di Era New Normal Covid-19.

2) Output: Meningkatnya kapasitas perempuan di akar rumput dan anggota forum Puspas terutama dalam amsa pademi ini.

3) Foto



e. **Fasilitasi Sinergi Akademisi/Lembaga Riset drk PPPA Bersama Forum PUSPA Bengkulu, 30 September, 1, 2, 3 Oktober 2020,**

1) **Maksud dan Tujuan:**

- a) Tersosialisasinya Forkomwil Provinsi Bengkulu ke DP3P2KB Kota dan Kabupaten
- b) Masyarakat Bengkulu pada umumnya dan Warga kelurahan Penurunan dan Pondok Besi mendapatkan informasi mengenai Teknik Mengantisipasi KDRT
- c) Masyarakat Bengkulu pada umumnya dan warga kelurahan Penurunan dan Pondok Besi mendapatkan informasi mengenai pencegahan perkawinan anak melalui Testimoni Champion Pemimpin Muda Bengkulu melalui dialog "Muda Berkarya, karena Tunda Nikah Muda"
- d) Warga kelurahan Pondok Besi terutama Remaja dan anak mendapatkan Ketrampilan berwirausaha melalui pembibitan kelapa sebagai tanaman hias
- e) Warga kelurahan Penurunan terutama Besi Ibu-ibu mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam untuk upaya peningkatan kualitas ekonomi keluarga.

2) **Output:**

- a) Teragendakan pembentukkan Forkomwil di Kota dan 9 Kabupaten
- b) Masyarakat Bengkulu pada umumnya dan Warga kelurahan Penurunan dan Pondok Besi memahami Teknik Mengantisipasi KDRT
- c) Masyarakat Bengkulu pada umumnya dan warga kelurahan Penurunan dan Pondok Besi memahami pencegahan perkawinan anak melalui Testimoni Champion Pemimpin Muda Bengkulu melalui dialog "Muda Berkarya, karena Tunda Nikah Muda"
- d) Warga kelurahan Pondok Besi terutama Remaja dan anak berwirausaha melalui pembibitan kelapa sebagai tanaman hias
- e) Ketrampilan warga kelurahan Penurunan terutama Besi Ibu-ibu dalam untuk upaya peningkatan kualitas ekonomi keluarga

3) **Foto:**



f. Fasilitasi Sinergi Akademisi/Lembaga Riset dlrk PPPA Bersama Forum PUSPA **Sumut**, 24, 25 September, 14 Oktober 2020

1) Maksud dan Tujuan:

- a) Meningkatkan wawasan dan jaringan melalui seminar online "Perempuan Produktif di Era Adaptasi Baru Covid-19". Seminar ini akan menghadirkan testimoni dari perempuan-perempuan muda yang mampu beradaptasi dalam berbagai bisnis rumahan dan UKM ditengah wabah covid-19.
- b) Meningkatkan pengetahuan dan keahlian pemanfaatan teknologi dan informasi (media digital) untuk pengembangan bisnis usaha kecil dan rumahan bagi perempuan muda usia 16-30 tahun yang sudah atau sedang merintis bisnis rumahan/UKM.

2) Output:

- a) Terpilih sedikitnya 3 (tiga) orang perempuan muda inspirator bisnis rumahan/UKM di era pandemi covid-19 untuk testimoni, dan sedikitnya 30 orang perempuan muda usia 16-30 tahun mendapatkan pengetahuan baru untuk beradaptasi dan produktif di situasi pandemi covid-19.
- b) 30 orang perempuan muda di kecamatan Belawan, Medan Sunggal, dan Kota Binjai meningkat kapasitasnya dalam penggunaan IT dalam peningkatan produk dan pasar bagi bisnis rumahan dan UKM
- c) Terbangunnya jaringan bisnis perempuan muda di Belawan, Sunggal dan Binjai melalui waralaba "Cafe Inspirasi" yang dikelola remaja perempuan, mendukung kawasan wisata ramah anak.



- h. Fasilitasi sinergi akademisi/lembaga riset dalam rangka PPPA bersama Forum Puspa **Kepri** tanggal 30 Oktober, 5, 6 November 2020, meliputi kegiatan : Webinar "Menjaga Keluarga Tetap Kuat di Masa Pandemi", Pelatihan Penanaman Tanaman Obat Keluarga, Pelatihan Pembuatan Jamu Tradisional

1) Maksud dan Tujuan:

Tujuan dari Rencana Aksi "Kampung Inspiratif Perempuan Kreatif yang Ramah Anak" Tahun 2020 Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Forkomwil PMP3AP2KB) Provinsi Kepulauan Riau, adalah:

- a) Meningkatkan kreativitas perempuan di Kelurahan Tanjung Unggat sesuai dengan kearifan lokal.
- b) Memberikan edukasi tentang perempuan kreatif berbasis kearifan lokal di Era New Normal Covid-19.
- c) Membuat taman literasi bagi anak-anak usia sekolah di Kelurahan Tanjung Unggat.

2) Output : Terciptanya inovasi "Kampung Inspiratif Perempuan Kreatif yang Ramah Anak" Tahun 2020 Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Forkomwil PMP3AP2KB) Provinsi Kepulauan Riau

3) Foto:



- i. Fasilitasi Sinergi Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka PPPA Bersama Forum PUSPA **Maluku** 13, 14, 15 November 2020
 - 1) Maksud dan Tujuan:
 - a) Meningkatkan kreatifitas anak usia sekolah dasar di masa pandemik covid-19
 - b) Mengorganisir anak yang didukung partisipasi komunitas untuk mengelola waktu luang dengan kreatif serta berjiwa seni
 - c) Menyalurkan kreatifitas anak lewat pengelolaan daur ulang sampah
 - d) Mendokumentasikan kreatifitas anak serta mempublikasikan sebagai model media belajar kreatif dimasa pandemik covid-19
 - e) Mengadvokasi kebijakan penganggaran untuk perkuatan komunitas anak Kampung Rinjani.
 - f) Memperkuat sinergitas dan kapasitas dalam rangka melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan di tingkat desa dan pemerintah kota Ambon terkait penguatan potensi dan hak anak.
 - 2) Output:
 - a) Adanya kesadaran komunitas untuk memastikan perlindungan warga khususnya anak.
 - b) Adanya solidaritas komunitas yang sadar dan mengawal upaya pemutusan rantai pandemik covid-19 secara kreatif di tingkat desa.

- c) Adanya pendokumentasian model kreatifitas anak di masa pandemik covid-19 di Kampung Pisang yang diharapkan menjadi model sinergi kerja berjaringan.

3) Foto:



- j. Fasilitasi Sinergi Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka PPPA Bersama Forum PUSPA **Bali** 28 November 2020, meliputi kegiatan: Webinar Strategi menghadapi dampak Covid-19

1) Maksud dan Tujuan:

- a) Meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan strategi masyarakat terutama perempuan dalam upaya penanganan dampak covid-19 terutama pada bidang ekonomi.
- b) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu perempuan dan anak.

2) Output:

- a) Masyarakat dan forum PUSPA Bali memiliki pengetahuan, wawasan, dan strategi dalam upaya penanganan dampak covid-19 terutama pada bidang ekonomi.
- b) Masyarakat dan forum PUSPA Bali memiliki pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu perempuan dan anak.

3) Foto:



k. Fasilitasi sinergi akademisi/lembaga riset dalam rangka PPPA bersama Forum Puspa **Jateng** tanggal 20, 25, dan 27 Oktober 2020

1) Maksud dan Tujuan:

- a) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terutama perempuan dalam upaya untuk membentuk ketahanan pangan di lingkungan keluarganya masing-masing dengan memanfaatkan lahan yang terbatas.
- b) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para guru PAUD dan orang tua terutama ibu dalam mendampingi anak usia dini melaksanakan pembelajaran di rumah dengan inovasi sehingga pembelajaran di rumah aman, menyenangkan dan efektif. Sasaran Webinar ini orang tua dan guru PAUD, dan tutor POS PAUD.
- c) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pencegahan perkawinan usia anak

2) Output:

- a) Peserta mendapatkan pengetahuan dan wawasan ketahanan pangan di lingkungan keluarganya masing-masing dengan memanfaatkan lahan yang terbatas.
- b) Peserta mendapatkan pengetahuan dan inovasi sehingga pembelajaran di rumah aman, menyenangkan dan efektif.
- c) Peserta mengetahui dan memahami pentingnya pencegahan perkawinan usia anak.

3) Foto:



I. Fasilitasi Sinergi Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka PPPA Bersama Forum PUSPA **Sumbar**

1) Maksud dan Tujuan:

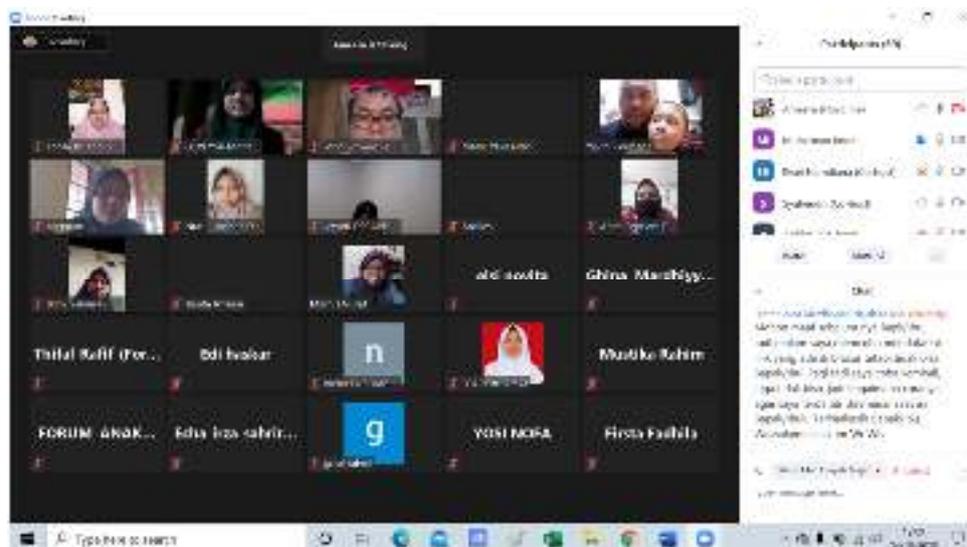
- a) Memperkuat kelembagaan Pokja Pengasuhan dan Keluarga serta Forum Anak sehingga terlembaga serta dilakukan peningkatan kapasitas pokja pengasuhan dan Forum Anak dalam merespon berbagai persoalan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam masa pandemi.
- b) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan lembaga pendamping anak dan keluarga untuk mampu menjalankan tugas-tugas pendampingan keluarga untuk pengasuhan yang ramah anak dalam masa pandemi.
- c) Meningkatkan respon berbagai elemen masyarakat untuk peduli dengan pengasuhan ramah anak pada masa pandemi.

2) Output:

- a) Meningkatkan kapasitas Pokja Pengasuhan dan Forum Anak dalam masa pandemi.
- b) Terbentuknya program dan kegiatan sinergi
- c) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan lembaga pendamping anak dan keluarga untuk mampu menjalankan tugas-tugas pendampingan keluarga untuk pengasuhan yang ramah anak dalam masa pandemi.

- d) Meningkatkan respon berbagai elemen masyarakat untuk peduli dengan pengasuhan ramah anak pada masa pandemi.

3) Foto:



Pada Sasaran Program ketiga “Peningkatan sinergi program dan kegiatan di lembaga masyarakat” dengan capaian indikator sasaran “Jumlah Provinsi yang melakukan sinergi program dan kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”, seperti terlampir di table bawah ini.

Tabel 17 Capaian sasaran program keempat (SP-4) dengan Indikator Kinerja Sasaran (IKS-1)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Peningkatan sinergi program dan kegiatan di lembaga masyarakat	1. Jumlah Provinsi yang melakukan sinergi program dan kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	34 Provinsi	34 Provinsi	100%

Sasaran Program “Peningkatan sinergi program dan kegiatan di lembaga masyarakat” mempunyai target 34 Provinsi yang melakukan sinergi program dan

kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.. Target tersebut dapat tercapai 100%.

2. Indikator Kinerja Sasaran (IKS-2): "Jumlah inovasi sebagai hasil sinergi program dan kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan".

Upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, untuk mendorong inovasi sebagai hasil sinergi program dan kegiatan organisasi agama dan kemasyarakatan, antara lain:

- a. Desa Wisata Ramah Anak (Sumatera Utara)

Nama kegiatan : Desa wisata Bahari Ramah Anak

Maksud dan tujuan : Untuk mengembangkan potensi wisata bahari di Medan Belawan dengan system wisata yang ramah anak

Foto :



- b. Inovasi Teh Beras Merah (Bali)

Nama kegiatan : Pengembangan inovasi pembuatan teh dari beras merah organik

Maksud dan tujuan : untuk mengembangkan potensi ekonomi untuk pemberdayaan kewirausahaan perempuan di Kabupaten Tabanan

c. Kerajinan bambu dalam menuju Desa Wisata Ramah Anak (Bali)

Nama kegiatan : Nama kegiatan Pengembangan inovasi pembuatan kerajinan bambu

Maksud dan tujuan : untuk mengembankan potensi ekonomi untuk pemberdayaan kewirausahaan perempuan di Kabupaten Tabanan

Foto



d. Pembuatan bahan Upakara

Nama kegiatan : Pengembangan ekonomi dengan basis budaya

Maksud dan tujuan : untuk mengembankan potensi ekonomi untuk pemberdayaan kewirausahaan perempuan di Kabupaten Bangli

e. Pembuatan Dupa (Bali)

Nama kegiatan : Nama kegiatan Pengembangan ekonomi dengan basis budaya

Maksud dan tujuan : untuk mengembankan potensi ekonomi untuk pemberdayaan kewirausahaan perempuan di Kabupaten Bangli

Foto :



f. Wisata jamu Tradisional (Riau)

Nama kegiatan : Wisata Jamu Tradisional

Maksud dan tujuan : untuk mengembangkan potensi ekonomi untuk pemberdayaan kewirausahaan perempuan di Provinsi Riau

Foto:



g. Budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

Nama kegiatan : Budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

Maksud dan tujuan : untuk mengembangkan potensi ekonomi untuk pemberdayaan kewirausahaan perempuan di Provinsi Riau

Foto :



h. Pembuatan Bank Sampah

Nama kegiatan : Pembuatan Bank Sampah

Maksud dan tujuan : untuk mengembangkan potensi ekonomi untuk pemberdayaan kewirausahaan perempuan di Provinsi Maluku

Kendala yang dihadapi: kondisi pandemic sehingga koordinasi tidak terlalu maksimal dan target tidak karena menggunakan metode daring. Selain itu terkendala dalam pemantauan output pelaksanaa kegiatan yang dilaksanakan.

Program inovasi dalam kegiatan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha tidak dapat tercapai dikarenakan adanya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Serta adanya reconfusing anggaran yang ditujukan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Rencana tindak lanjut menerukan kegiatan yang telah dilakukan dengan menambah frekuensi dan koordinasi melalui media daring.

Pada Sasaran Program ketiga "[Peningkatan sinergi program dan kegiatan di lembaga masyarakat](#)" dengan capaian indikator sasaran "[Jumlah inovasi sebagai hasil sinergi program dan kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan](#)", seperti terlampir di table bawah ini.

Tabel 18 Capaian sasaran program keempat dan (SP-4) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kedua (IKS-2)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Peningkatan sinergi program dan kegiatan di lembaga masyarakat	2. Jumlah inovasi sebagai hasil sinergi program dan kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan	15 Inovasi	8 Inovasi	53%

Sasaran Program "Peningkatan sinergi program dan kegiatan di lembaga masyarakat" mempunyai target 15 inovasi sebagai hasil sinergi program dan kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan. Target tersebut dapat tercapai 53%.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain capaian kinerja diatas ada beberapa kegiatan yang mendukung proses pencapaian kinerja diatas seperti

1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
 - a. Penyusunan rencana program; dan penyusunan anggaran (PK 2020, Revisi RKAKL 2020);
 - b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 - c. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian
 - d. Pengelolaan data dan informasi (Laporan Keuangan, BMN, laporan triwulan, bahan rapim dan bahan laporan kinerja);
 - e. Pengelolaan perbendaharaan
 - f. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2. Kegiatan Terkait Penanganan Covid-19
 - a. Bantuan Spesifik bagi Perempuan dan Anak

Kegiatan ini merupakan bantuan yang di peruntukan khusus bagi perempuan dan anak di saat kondisi pandemi Covid-19, yang pada saat ini perempuan dan anak merupakan salah satu kelompok rentan yang terdampak covid, selain menghadapi masalah ekonomi, perempuan sering mengalami dampak secara psikis dan fisik akibat beban berlapis yang dialami pada saat

pembatasan social, begitu pula terhadap anak yang dapat mengalami kehilangan pengasuhan yang layak oleh orang tua atau pengasuh utama lainnya.

- 1) Bantuan Spesifik bagi Perempuan dan Anak di Kabupaten Purwokerto Jawa Tengah
- 2) Bantuan Spesifik bagi Perempuan dan Anak di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara
- 3) Kab. Serang Banten pada tanggal 12 Agustus 2020: Kebutuhan Spesifik Anak Usia 0-2 tahun sebanyak 3 orang, Kebutuhan Spesifik Anak Usia 3 – 4 tahun sebanyak 49 orang, Kebutuhan Spesifik Perempuan Dewasa sebanyak 75 orang, Kebutuhan Spesifik Lansia sebanyak 53 orang.
- 4) Kab. Bangkalan, Jawa Timur pada tanggal 14 Agustus 2020 : Kebutuhan Spesifik Perempuan Hamil/Menyusui sebanyak 203 orang.
- 5) Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara pada tanggal 22 November 2020 : Kebutuhan Spesifik Anak Usia 0-2 tahun sebanyak 16 orang, Kebutuhan Spesifik Anak Usia 4-11 tahun sebanyak 132 orang, Kebutuhan Spesifik Anak 12-19 tahun sebanyak 58 orang, Kebutuhan Spesifik Perempuan Dewasa sebanyak 2 orang, Kebutuhan Spesifik Lansia sebanyak 12 orang.
- 6) Kab. Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara pada tanggal 22 November 2020: Kebutuhan Spesifik Anak Usia 0-2 tahun sebanyak 16 orang, Kebutuhan Spesifik Anak Usia 3 – 4 tahun sebanyak 15 orang, Kebutuhan Spesifik Anak 5-17 tahun sebanyak 119 orang, Kebutuhan Spesifik Perempuan Dewasa sebanyak 47 orang, Kebutuhan Spesifik Lansia sebanyak 4 orang.
- 7) Penyediaan bantuan pemerintah lainnya untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dlrk percepatan penanganan covid-19 di Majalengka, Jawa Barat.
- 8) Penyediaan bantuan pemerintah lainnya untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dlrk percepatan penanganan covid-19 di Kab Sidoarjo, Jawa Timur.
- 9) Penyediaan bantuan pemerintah lainnya untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dlrk percepatan penanganan covid-19 di desa Kawo, Lombok Tengah,
- 10) Bantuan Pemerintah Lainnya untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan drk. Percepatan Penanganan Covid-19, tanggal 28-30 September 2020 di Padang Sumatera Barat.



b. KIE infografis Kiat2 menjalani hidup yang sehat:

- 1) Animasi dan Infografis kiat hidup sehat menghadapi Pandemi Covid-19
- 2) E-Book dan Videografis bangkit pasca pandemi Covid-19
- 3) Panduan Manajemen Stress saat pandemic Covid-19
- 4) Menjawab Dampak Isu Covid-19 bersama Pakar Profesi



c. KIE Pencegahan dan Penanganan Covid-19 bagi Media Eleksos

- 1) Pelaksanaan KIE Media Eleksos ttg Penanganan dan Pencegahan Covid-19 dengan JRKI

- a) Pertemuan Koordinasi Lembaga Media Eleksos dan Masyarakat (Webinar Peran Penyiaran Komunitas Menyambut Era Kenormalan Baru)
- b) Pertemuan Koordinasi Lembaga Media Eleksos dan Masyarakat (Webinar Perlindungan Anak dlm Pemberitaan Media di Masa Pandemi Covid-19)



- 2) Teknis peliputan yang dapat dilakukan oleh Junarlis dalam menghadapi pandemic
- 3) Imbauan bagi Jurnalis Perempuan dan Junarlis yang tinggal bersama Anak
- 4) Protokol Peliputan Covid-19 Responsif Gender
- 5) Perusahaan Media Wajib menjamin Keselamatan Jurnalis
- 6) Peran Penyiar Komunitas menyambut Era Kenormalan Baru



d. KIE Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 bagi Organisasi Keagamaan

- 1) Pesantren Ramah Anak Cegah dan hadapi Covid-19
- 2) Tokoh Agama Cegah Covid-19



e. Fasilitasi Pegawai dalam

menghadapi Covid19:

- Peningkatan Daya Tahan Tubuh + alat perlindungan kesehatan

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat NOMOR: SP DIPA- 047.01.1.664960/2020 tanggal 11 November 2019 yang telah mengalami pemotongan anggaran, sehingga pagu antar eselon II berubah, sebagai berikut:

Tabel 19. Perubahan Anggaran Tahun 2020

NO	KEGIATAN	SEMULA	MENJADI
1.	Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	2.500.000.000	1.698.000.000
2.	Partisipasi Media	2.500.000.000	1.698.000.000
3.	Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	4.500.000.000	3.056.400.000
4.	Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	3.000.000.000	2.440.100.000
	TOTAL	12.500.000.00	8.892.500.000

Rincian realisasi anggaran Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang ada pada unit eselon II, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	1.698.000.000	1.692.295.315	99,66
2.	Partisipasi Media	1.698.000.000	1.689.588.644	99,50
3.	Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat	3.056.400.000	3.052.673.815	99,88
4.	Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	2.440.100.000	2.439.432.184	99,97
	TOTAL	8.892.500.000	8,873,989,958	99.79

Tabel 21 Perkembangan Serapan Anggaran tahun 2018 dan 2020 Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat

NO.	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	2020	8.892.500.000	8,873,989,958	99.79
2.	2019	31.883.970.000	31.725.849.157	99,50
3.	2018	51.287.200.000	50.323.663.955	98,12

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, anggaran Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 18.597.814.798,-, yang cukup besar. Realisasi anggaran Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat selama 3 (tiga) tahun diatas 95%.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum, Satker Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat menunjukkan kesungguhan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan melalui strategi PUG dan PUHA.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk

1. Mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak;
2. Menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Melalui Laporan Kinerja Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2020 ini, secara keseluruhan memaparkan berbagai keberhasilan, termasuk kendala dalam mencapai Sasaran Strategis Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat dan perkembangannya di tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Mengenai kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi pekerjaan rumah dan fokus perbaikan kinerja Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai lembaga masyarakat dan instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif,

Merujuk pada uraian Bab-Bab sebelumnya dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Secara umum sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sudah tercapai, dan bahkan beberapa diantaranya melampaui target.
2. Secara rinci terdapat 1 (satu) IKKS yang pencapaiannya melebihi target, dimana 1 (satu) IKKS yang pencapaiannya sesuai dengan target, dan 1 (satu) IKKS yang belum dapat mencapai target.
3. IKKS yang capaiannya di atas target yang telah ditetapkan, yakni Jumlah lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan yang menerapkan kebijakan PPPA
4. IKKS yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni Jumlah Pemda Prov/Kab/Kota yang menerapkan model sinergi untuk peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

5. IKKS yang capaiannya belum sesuai target yang telah ditetapkan, yakni Jumlah Inovasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini dimasa yang akan datang perlu diantisipasi dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diatasi secara dini. Salah satu hal terpenting yang perlu untuk segera dilakukan adalah membangun manajemen kinerja yang lebih baik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, termasuk menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat ke depan

LAMPIRAN - I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telp: (021) 3842030, 3842032 Fax: (021) 3895881, 3895889

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Indra Gunawan
Jabatan : Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

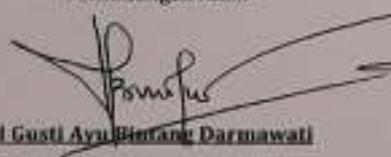
Nama : I Gusti Ayu Bintang Darmawati
Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak


I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat


Indra Gunawan



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telp. (021) 3042034, 3805552 Fax. (021) 3866462, 3866490

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	Jumlah Dunia Usaha yang berperan serta dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	30 Dunia Usaha
2.	Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Media serta Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Akademisi yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	45 Lembaga Masyarakat
3.	Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Lembaga Profesi, Media serta Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pencegahan perkawinan anak	19 Lembaga Masyarakat
4.	Peningkatan sinergi program dan kegiatan di lembaga masyarakat	1. Jumlah provinsi yang melakukan sinergi program dan kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Jumlah Inovasi sebagai hasil sinergi program dan kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan	34 Provinsi 15 Inovasi

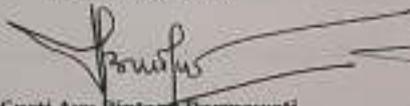


KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan: Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110
Telp: (021) 3842038, 3805182 Fax: (021) 3800602, 3800600

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	Rp. 2.500.000.000,-
2. Partisipasi Media	Rp. 2.500.000.000,-
3. Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat	Rp. 4.500.000.000,-
4. Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	Rp. 3.000.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak


I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Jakarta, Januari 2020
Pimpinan Unit Kerja,
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat


Indra Gunawan



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Menteri Arief Rahman Hakim Nomor 15, Jakarta 10110
Telp: (021) 3842030, 3889007 Fax: (021) 3889002, 3889004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Prihantini Lestari Wijayanti

Jabatan : Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Indra Gunawan

Jabatan : Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan
Dunia Usaha

Indra Gunawan

Sri Prihantini Lestari Wijayanti



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telp: (021) 3842030, 3843002 Fax: (021) 3805002, 3805000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI PARTISIPASI LEMBAGA PROFESI DAN DUNIA USAHA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	Jumlah Dunia Usaha yang berperan serta dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	30 Dunia Usaha
2.	Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	12 Lembaga
3.	Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Lembaga Profesi yang melakukan pencegahan perkawinan anak	6 Lembaga
4.	Meningkatnya partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Jumlah kebijakan mendorong peningkatan Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam PPPA 2. Jumlah Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang difasilitasi PUG dan PIHA 3. Jumlah provinsi yang melakukan sinergi program dan kegiatan di Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Jumlah inovasi sebagai hasil sinergi program dan kegiatan lembaga Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	1 Kebijakan 12 Lembaga 12 Provinsi 7 Inovasi

KEGIATAN

1. Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha

ANGGARAN

Rp. 2.500.000.000,-

Jakarta, Januari 2020

Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

Pimpinan Unit Kerja,
Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan
Dunia Usaha

Indra Gunawan

Sri Prihantini Lestari Wijayanti



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 10, Jakarta 10110,
Telp: (021) 3842028, 3800682 Fax: (021) 3805562, 3805569

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maydian Werdiastuti

Jabatan : Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Indra Gunawan

Jabatan : Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

Indra Gunawan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Partisipasi Organisasi
Keagamaan dan Kemasyarakatan

Maydian Werdiastuti



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110
Telpom (021) 3842000, 3800502 Fax. (021) 780080, 3800801

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI PARTISIPASI ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Kemasyarakatan dan Akademisi/Lembaga Riset yang berpartisipasi dalam percepatan penurunan kekerasan melalui pencegahan	27 Lembaga
2.	Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Lembaga Keagamaan dan lembaga kemasyarakatan yang melakukan pencegahan perkawinan anak	10 Lembaga
3.	Meningkatkan partisipasi lembaga keagamaan, kemasyarakatan dan Akademisi/lembaga Riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Jumlah kebijakan partisipasi lembaga keagamaan, kemasyarakatan dan Akademisi/lembaga Riset dalam PPPA	3 Kebijakan
		2. Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Kemasyarakatan dan Akademisi/Lembaga Riset yang di fasilitasi PUG dan PIHA	27 Lembaga
		3. Jumlah provinsi yang melakukan sinergi program dan kegiatan di lembaga keagamaan, kemasyarakatan, dan akademisi/lembaga riset dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	11 Provinsi
		4. Jumlah Inovasi sebagai hasil sinergi program dan kegiatan lembaga keagamaan, kemasyarakatan, dan akademisi/lembaga riset	8 Inovasi

KEGIATAN

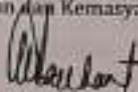
ANGGARAN

1. Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Rp. 4.500.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat


Indra Gunawan

Jakarta, Januari 2020
Pimpinan Unit Kerja,
Asisten Deputi Partisipasi Organisasi
Keagamaan dan Kemasyarakatan


Maydian Werdiasuti



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatahillah

Jabatan : Asisten Deputi Partisipasi Media

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Indra Gunawan

Jabatan : Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Partisipasi Media

Indra Gunawan

Fatahillah



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110
Telp: (021) 3842038, 3803052 Fax: (021) 3825002, 3803050

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI PARTISIPASI MEDIA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Lembaga Media yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	6 Lembaga
2.	Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah lembaga Media yang melakukan pencegahan perkawinan anak	6 Lembaga
3.	Meningkatnya partisipasi Lembaga Media dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Jumlah Lembaga Media yang di fasilitasi PUG dan PUSA	10 Lembaga
		2. Jumlah lembaga media yang terlibat dalam forum LM dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	60 Lembaga
		3. Jumlah provinsi yang melakukan sinergi program dan kegiatan di lembaga media dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	10 Provinsi

KEGIATAN

1. Partisipasi Media

ANGGARAN

Rp. 2.500.000.000,-

Jakarta, Januari 2020

Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

Pimpinan Unit Kerja,
Asisten Deputi Partisipasi Media

Indra Gunawan

Fatahillah



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Murni Menteng Barat Nomor 15, Jakarta 10110.
Telepon (021) 3842038, 3005932 Fax (021) 3005032, 3005200

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Entos

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Indra Gunawan

Jabatan : Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

Indra Gunawan

Pihak Pertama,
Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi
Masyarakat

Entos



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan kesekretariatan dan layanan perkantoran Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	1. Persentase perencanaan program, anggaran, pelaporan dan manajemen kinerja dan SDM yang sesuai dengan standar 2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana operasional Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	100% 100%

KEGIATAN

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat

ANGGARAN

Rp. 3.000.000.000,-

Atasau Pimpinan Unit Kerja,
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

Indra Gunawan

Jakarta, Januari 2020
Pimpinan Unit Kerja,
Sekretaris Deputy Bidang Partisipasi
Masyarakat

Intos

LAMPIRAN - II

RENCANA AKSI TAHUN 2020

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI PARTISIPASI LEMBAGA PROFESI DAN DUNIA USAHA

Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam pembangunan PPPA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Meningkatnya partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Jumlah Lembaga Profesi yang mendapat penguatan pelembagaan PUG dan PUH	6 Lembaga	-	-	6	-
		2. Jumlah Dunia Usaha yang mendapat penguatan pelembagaan PUG dan PUHA	6 Lembaga	-	-	6	-

1. Kepala Bidang Lembaga Profesi

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
1.	Advokasi dan Fasilitasi Pembentukan Lembaga Profesi di Daerah	-	-	-	15	Terjalinya sinergi yang membahas isu PPPA secara fokus disesuaikan dengan bidang keahlian dari pakar Profesi.	Fasilitasi Advokasi Informasi dan Focus Group Discussion (FGD) Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagi Lembaga Profesi Via Zoom Meeting. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan fokus isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masing-masing bidang yang ada dalam Forum PROSAPENA. 1. Bidang Pendidikan pada 21 November 2020 2. Bidang Kesehatan pada 19 November 2020 3. Bidang Hukum pada 22 November 2020
2.	Workshop PUG dan PUHA Bagi SDM Lembaga Profesi di Pusat dan Daerah	-	-	15	-	Terselenggaranya peningkatan pemahaman PUG PUHA bagi SDM Lembaga Profesi ditingkat pusat maupun daerah.	Workshop Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Profesi secara daring/online. Kegiatan dilaksanakan secara beruntun, dimulai pada tanggal 15 September hingga tanggal 23 Oktober 2020. Sasaran dari Workshop ini adalah sumber daya manusia (SDM) lembaga

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
							<p>profesi terkait. Narasumber dari Pakar Profesi tergabung dalam Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak (PROSAPENA), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tanggal 14 Oktober 2020 2. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) tanggal 13 Oktober 2020 3. Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) tanggal 15 September 2020 4. Ikatan Konselor Indonesia (IKI) tanggal 6 Oktober 2020 5. Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) tanggal 1 Oktober 2020 6. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI LUHUT) tanggal 20 Oktober 2020 7. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI OTTO) tanggal 23 Oktober 2020 8. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) tanggal 15 Oktober 2020 9. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) tanggal 16 Oktober 2020 10. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tanggal 18 September 2020 11. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tanggal 29 September 2020 12. Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) tanggal 8 Oktober 2020 13. Junior Doctor Network Indonesia (JDNI) tanggal 17 September 2020 14. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
							tanggal 30 September 2020 15. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) tanggal 7 Oktober 2020
3.	Forum Koordinasi Lembaga Profesi	-	15	-	-	Terfasilitasinya Koordinasi dan Sinergi antar Lembaga Profesi.	Sinergi Program Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam rangka Menyongsong Tata Kehidupan Normal Baru dengan target PUSPA dari 12 Provinsi binaan Asdep LPDU. Adapun Pelaksanaannya terbagi menjadi 4 kegiatan, yakni: 1. Fasilitasi Sinergi Webinar Menyongsong Tatanan Kehidupan Normal Baru (New Normal) Bersama Pakar Profesi Seri Kesehatan tanggal 20 Juli 2020. 2. Fasilitasi Sinergi Webinar Menyongsong Tatanan Kehidupan Normal Baru (New Normal) Bersama Pakar Profesi Seri Pendidikan tanggal 22 Juli 2020. 3. Fasilitasi Sinergi Webinar Menyongsong Tatanan Kehidupan Normal Baru (New Normal) Bersama Pakar Profesi Seri Hukum tanggal 24 Juli 2020.
4.	KIE tentang PP dan PA bagi Lembaga Profesi	-	1	15	8	Tersedianya informasi dan internalisasi mengenai PP dan PA terkait bidang kesehatan, pendidikan, dan hukum dalam bentuk video, buku, leaflet, poster, buku saku, dan banner.	Pembuatan KIE berupa informasi PPPA terkait bidang kesehatan, pendidikan, dan hukum oleh Lembaga Profesi.
5.	Monitoring dan Evaluasi Penguatan kelembagaan PUG dan PUHA pada lembaga profesi	1	-	-	1	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi terhadap mitra Lembaga Profesi terkait.	1. Pelaksanaan Pemantauan Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA pada Lembaga Profesi dlrk Workshop Rencana Aksi Mandalika Bebas Eksploitasi Anak tanggal 26-27 Februari.

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
							2. Pelaksanaan Pemantauan PUG dan PUHA di Provinsi Bali tgl 17-19 November 2020

2. Kepala Bidang Dunia Usaha

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
1.	Fasilitasi Kebijakan PP dan PA terkait Partisipasi Dunia Usaha	-	-	1	2	Terjalinya sinergi yang membahas isu PPPA secara fokus disesuaikan dengan bidang keahlian dari pakar dunia usaha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Webinar PP dan PA partisipasi dunia usaha di Jakarta tanggal 09 September 2020 2. Koordinasi PP PA Partisipasi Masyarakat di Jakarta tgl 17 Desember 2020 3. Fasilitasi Koordinasi PPPA Partisipasi Masyarakat dan Keluarga tgl 21 Desember 2020 di Jakarta
2.	Workshop PUG dan PUHA Bagi SDM Dunia Usaha di Pusat dan Daerah	-	-	-	13	Terselenggaranya peningkatan pemahaman PUG PUHA bagi SDM Dunia Usaha ditingkat pusat maupun daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop Dunia Usaha untuk peningkatan Ekonomi Perempuan (Best Practice CSR) tgl 23 November 2020 2. Sinergi Lembaga Masyarakat PUSPA terkait Program PP dan PA di 12 Provinsi PUSPA Binaan Asdep LPDU
3.	Pendampingan Dunia Usaha bagi Kelompok Perempuan Pelaku Ekonomi	1	-	-	2	Terfasilitasinya Koordinasi dan Sinergi antar dengan dunia usaha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asistensi dan Pendampingan Dunia Usaha bagi Kelompok Perempuan Pelaku Ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tgl 20 Februari 2020 2. Asistensi dan Pendampingan Dunia Usaha bagi kelompok Perempuan Pelaku Ekonomi di Luwu Utara (Kunker) tgl 12-13 November 2020 3. Asistensi dan Pendampingan Dunia Usaha bagi Kelpompok Perempuan Pelaku Ekonomi di Aceh (Kunker Aceh) tgl 26

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
							November 2020
4.	KIE tentang PP dan PA bagi Dunia Usaha	-	2	-	4	Tersedianya informasi dalam rangka partisipasi dunia usaha dalam PPPA.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencetakan Kaos dan Masker dalam Rangka Partisipasi Dunia Usaha dalam PP dan PA 2. Pencetakan Tumbler dlrk KIE Partisipasi Dunia Usaha dalam Pembangunan PP dan PA 3. Pencetakan Leaflet dlrk KIE Partisipasi DU dalam Pembangunan PP dan PA 4. Pencetakan Kotak Pensil dlrk KIE Partisipasi DU dalam Pembangunan PP dan PA 5. Pencetakan KIE Tas Pendukung Bantuan Covid 6. Pencetakan Flyer dlrk Penyusunan Materi KIE Partisipasi DU dalam PP dan PA
5.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA pada Dunia Usaha	1	-	-	2	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi terhadap mitra Dunia Usaha terkait.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA pada Dunia Usaha dlrk Kunjungan ke Lokasi Bencana Banjir di Kab.Lebak, Provinsi Banten tgl 16 Januari 2020 2. Pemantauan dan Penyusunan Rekomendasi Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA di provinsi DI Yogyakarta tgl 6 - 8 Desember 2020 3. Pemantauan dan Penyusunan Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA pada Dunia Usaha di Prov. Jawa Timur tgl 10 - 12 Desember 2020

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI PARTISIPASI LEMBAGA MEDIA**

Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Media dalam pembangunan PPPA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Meningkatnya partisipasi Lembaga Media dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Jumlah Lembaga Media Cetak yang Mendapat Penguatan Pelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 Lembaga Media	-	1	1	2
		2. Jumlah Lembaga Media Elektronik dan Sosial yang Mendapat Penguatan Pelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6 Lembaga Media	-	1	2	3

1. Kepala Bidang Media Cetak

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
1.	Pelatihan SDM Media	-	50	100	60	Terlatihnya jumlah SDM	Bimtek bagi SDM tentang PUG dan PUHA
2.	Pertemuan Koordinasi Media	-	1	-	1	Penguatan Kelembagaan tentang PUG dan PUHA	Pertemuan Koordinasi masyarakat tentang PUG dan PUHA
3.	Pelaksanaan KIE dan Literasi Media	-	1	-	1	Tersosialisasi nya program PP dan PA	Pelaksanaan kebutuhan spesifik perempuan dan anak dan pelaksanaan KIE media Cetak
4.	Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Media dan Masyarakat	-	-	-	1	Rekomendasi atas laporan	Monitoring dan evaluasi atas hasil Program PP dan PA

2. Kepala Bidang Media Elektronik

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
1.	Pelatihan SDM Media	-	60	50	100	Terlatihnya jumlah SDM	Bimtek bagi SDM tentang PUG dan PUHA
2.	Pertemuan Koordinasi Media	-	1	-	1	Penguatan Kelembagaan tentang PUG dan PUHA	Pertemuan Koordinasi masyarakat tentang PUG dan PUHA
3.	Pelaksanaan KIE dan Literasi Media	-	1	-	1	Tersosialisasi nya program PP dan PA	Pelaksanaan kebutuhan spesifik perempuan dan anak dan pelaksanaan KIE media Cetak
4.	Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Media dan Masyarakat	-	-	-	1	Rekomendasi atas laporan	Monitoring dan evaluasi atas hasil Program PP dan PA

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI PARTISIPASI ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Kegiatan : Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Meningkatnya partisipasi Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Akademisi/Lembaga Riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Jumlah kebijakan yang mendorong partisipasi Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Akademisi/Lembaga Riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	3 Kebijakan	-	-	2	1
		2. Jumlah Organisasi Keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUG dan PUHA	10	2	3	3	2
		3. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat penguatan pelembagaan PUG dan PUHA	12	1	0	4	7
		4. Jumlah Akademisi/Lembaga Riset yang mendapat penguatan pelembagaan PUG dan PUHA	5	1	0	4	0
		5. Jumlah Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Akademisi/Lembaga Riset yang terlibat dalam model sinergi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6 Lembaga	-	-	-	6

1. Kepala Bidang Organisasi Keagamaan

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
1.	Penyusunan Kebijakan PP dan PA terkait Partisipasi Organisasi Keagamaan	-	1	1	1	Tersusunnya Panduan Strategi Lembaga Keagamaan dalam Pencegahan kekerasan Berbasis Gender dan Praktik Berbahaya bagi Perempuan dan Anak.	<ul style="list-style-type: none"> - FGD Panduan Strategi Lembaga Keagamaan dalam Pencegahan kekerasan Berbasis Gender dan Praktik Berbahaya bagi Perempuan dan Anak pada tanggal 13 Juli 2020 - FGD Panduan Strategi Lembaga Keagamaan dalam Pencegahan kekerasan Berbasis Gender dan Praktik Berbahaya bagi Perempuan dan Anak, 1 Oktober 2020^[1]_{SEP} - Finalisasi Panduan Strategi Lembaga Keagamaan dalam Pencegahan kekerasan Berbasis Gender dan Praktik Berbahaya bagi Perempuan dan Anak, Jakarta tgl 2 November 2020
2.	Pelatihan bagi Organisasi Keagamaan	1	-	3	-	Terlatihnya SDM Pesantren Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Pesantren Ramah Anak di Provinsi Jawa Timur tgl 20-21 Februari 2020 - Pengembangan dan Pendampingan Pesantren Ramah Anak Prov. Sumatera Barat tgl 11-12 Agustus 2020 - Pengembangan dan Pendampingan Pesantren Ramah Anak Prov. Aceh tgl 22-23 September 2020 (daring) - Pengembangan dan Pendampingan Pesantren Ramah Anak Prov. Jawa Barat tgl 29-30 September 2020
3.	Sosialisasi PUG dan PUHA bagi Organisasi Keagamaan	-	-	6	1	Tersosialisasinya pemahaman mengenai PUG dan PUHA kepada Organisasi Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pesantren Ramah Anak pada tanggal 14 Juli 2020 di Provinsi Jawa Tengah Lewat Daring via Zoom Meeting)

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
							<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pesantren Ramah Anak Prov. Sumatera Barat (Daring) tgl 6 Agustus 2020 - Sosialisasi Pesantren Ramah Anak Prov. Aceh tgl 08 September 2020 - Sosialisasi Pesantren Ramah Anak Prov. Jawa Barat tgl 16 September 2020 - Sosialisasi PUG dan PUHA bagi Organisasi Keagamaan tanggal 5 September 2020, di Majalengka - Sosialisasi Pencegahan FGM/C/P2GP/Sunat Perempuan di Indonesia tgl 28 September 2020 - Sosialisasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia bagi organisasi keagamaan pada tanggal 20 oktober 2020.
4.	Forum Koordinasi Organisasi Keagamaan	1	1	-	-	Terselenggaranya Forum Koordinasi Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Workshop Penguatan Organisasi Keagamaan dalam rangka Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Bogor tgl 9-10 Maret 2020 - Workshop Daring Pelibatan FORLAPPA dalam rangka Mendukung Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita tgl 3-4 Juni 2020 di Jakarta
5.	Fasilitasi Sinergi Organisasi Keagamaan dalam rangka PP dan PA	1	-	1	-	Terfasilitasi sinergitas organisasi keagamaan dalam rangka PPPA	<ul style="list-style-type: none"> - Workshop Sinergi Bagi Organisasi Keagamaan Muslimat NU dalam rangka Pencegahan Sunat Perempuan di Depok, tgl 26-27 Februari 2020 - Pelaksanaan Penyediaan Bantuan

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
							Pemerintah Lainnya Untuk Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dirk Percepatan Penanganan Covid-19 Di Majalengka tanggal 5 September 2020
6.	KIE tentang PP dan PA bagi Organisasi Keagamaan	1	-	1	-	Tersedianya 2 video Edukasi mengenai pemahaman dalam pencegahan dan penanganan dampak Covid 19 Tersedianya Roll up banner yang didistribusikan kepada pesantren, dinas, dan kantor kemenag di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Video Motion Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan, Penanganan, dan Pengurangan Dampak Covid19 pada Bidang Partisipasi Organisasi Keagamaan (2 video) di bulan Maret - Pengadaan Roll Up Banner PRA di bulan Juli
7.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA pada Organisasi Keagamaan	-	-	-	4	Terpantau dan terevaluasinya pelaksanaan penguatan kelembagaan PUG dan PUHA pada organisasi keagamaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan PUG & PUHA pada Organisasi Keagamaan di Provinsi Bali, tgl 4 - 7 November 2020 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan PUG & PUHA pada Organisasi Keagamaan di Provinsi Jawa Timur, tgl 16 - 18 November 2020 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan PUG & PUHA pada Organisasi Keagamaan di Provinsi Bali, tgl 4 - 7 November 2020 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan PUG & PUHA pada Organisasi Keagamaan di Provinsi Sumatera Utara, tgl 25 - 28 November 2020
8.	Penguatan Peran Organisasi Keagamaan melalui penerapan Model Sinergi	-	-	-	1	Terlaksananya penguatan peran organisasi keagamaan melalui	Penguatan Peran Organisasi Keagamaan, tanggal 23 November 2020 di Jakarta -

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
						penerapan model sinergi.	

2. Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
1.	Penyusunan Kebijakan PP dan PA terkait Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan	-	-	2	-	Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Situasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Situasi Bencana, tanggal 21 Juli 2020. - Penyusunan Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Situasi Bencana, tanggal 14 Agustus 2020
2.	Pelatihan bagi Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-
3.	Sosialisasi PUG dan PUHA bagi Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	1	Tersosialisasinya pemahaman mengenai PUG dan PUHA kepada Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pencegahan Sunat Perempuan (FGM/G/P2GP) di Indonesia tgl 19 Oktober 2020
4.	Forum Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan	-	-	3	-	Terbentuknya forum koordinasi organisasi kemasyarakatan dalam rangka PPPA	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan Koordinasi Forum PUSPA Wilayah Regional Barat, Tengah, Timur terkait Isu Gender 10 Agustus 2020 - FGD Koordinasi LM tentang PPPA di Jakarta tgl 19 Agustus 2020 - Pertemuan Koordinasi dalam rangka sosialisasi percepatan penanganan covid-19 di sidoarjo tgl 31 Agustus

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
							2020
5.	Fasilitasi Sinergi Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka PP dan PA	2	-	4	2	Terfasilitasi sinergitas organisasi kemasyarakatan dalam rangka PPPA	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Persiapan Kerja Sinergi bagi Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan PP dan PA Tingkat Pusat di Jakarta, tanggal 11 Februari 2020 - Rapat Koordinasi Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan PPPA di Tingkat Pusat di Jakarta 25 Februari 202 - Fasilitasi Sinergi Organisasi dalam Rangka Pencegahan FGM/C bagi Lembaga Masyarakat, tanggal 9-10 September 2020 - Fasilitasi Sinergi Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka Pencegahan FGM/C bagi LM tgl 14-15 September 2020 - Pelaksanaan Penyediaan Bantuan Pemerintah Lainnya Untuk Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dirk Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kab Sidoarjo pada bulan Agustus - Fasilitasi Sinergi Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Soreang Kabupaten Bandung tanggal 28 September 2020 - Fasilitasi Sinergi Organisasi Kemasyarakatan dirk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 8 Oktober 2020

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
							- Fasilitasi Sinergi Organisasi Masyarakat dalam rangka PPPA Bersama Forum PUSPA Jabar, 13 Oktober 2020
6.	KIE tentang PP dan PA bagi Organisasi Masyarakat	1	-	2	-	Tersedianya video Edukasi mengenai pemahaman dalam pencegahan dan penanganan dampak Covid 19 Tersedianya Roll up banner yang didistribusikan kepada orgamas	- Pembuatan Video Motion Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Manajemen Stress dalam Mengurangi Dampak Covid19 pada Bidang Partisipasi Akademisi dan Lembaga Riset (1 video) pada bulan Maret - Pengadaan Roll UP Banner Anak-anak Belajar Dari Kehidupan Mereka pada bulan Juli - Pengadaan Jasa Penyusunan Video Dokumenter tentang Pencegahan Sunat Anak Perempuan dari tanggal 3 september sd 30 september 2020
7.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA pada Organisasi Masyarakat	-	-	1	2	Terantau dan terevaluasinya pelaksanaan penguatan kelembagaan PUG dan PUHA pada organisasi keagamaan.	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA pada Organisasi Masyarakat di Lombok tanggal 29 Agustus 2020

3. Kepala Bidang Akademisi dan Lembaga riset

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
1.	Penyusunan Kebijakan PP dan PA terkait Partisipasi Akademisi/ Lembaga Riset	-	-	2	-	Panduan Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di Perguruan Tinggi	- Penyusunan Draft Awal Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Perguruan Tinggi tgl 21 Juli 2020 ^[1] _{SEP}

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
							- Finalisasi Panduan Pelaksanaan PUG dan PUHA Bagi Akademisi tgl 3 Agustus 2020 ^[1] _{SEP}
2.	Pelatihan bagi Akademisi/Lembaga Riset	-	-	-	1	Terlatihnya SDM bagi Akademisi dan lembaga riset dalam rangka PPPA	Bimtek Perguruan Tinggi Responsif Gender bagi Akademisi dan Lembaga Riset tanggal 3-4 November 2020
3.	Sosialisasi PUG dan PUHA bagi Akademisi/Lembaga Riset	1	1	3	-	Tersosialisasinya pemahaman mengenai PUG dan PUHA kepada akademisi dan lembaga riset	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Panduan Perguruan Tinggi Responsif Gender di Provinsi Sumatera Utara tgl 20 Februari 2020 - Tindak Lanjut Panduan Perguruan Tinggi Responsif Gender di Jakarta tgl 16 Juni 2020 - Pembahasan Langkah-langkah Pembuatan SK Rektor PTRG tgl 3 Juli 2020 - Sosialisasi PUG dan PUHA Bagi Akademisi Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Lombok Tengah tgl 24 Agustus 2020 - Sosialisasi PUG dan PUHA bagi Akademisi/Lembaga Riset tentang PTRG di masa Pandemi, 18 September 2020
4.	Forum Koordinasi Akademisi/Lembaga Riset	-	-	1	1	Terbentuknya forum koordinasi Akaedemisi dan lembaga riset dalam rangka PPPA	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan Koordinasi Akademisi/Lembaga Riset (Daring/ Online) tanggal 4 Agustus 2020 - Koordinasi Pelaksanaan PUG dan PUHA Bidang Partisipasi Akademisi dan Lembaga Riset, 16 Oktober 2020

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
5.	Fasilitasi Sinergi Akademisi/ Lembaga Riset dalam rangka PPPA	-	-	7	-	Terfasilitasi sinergitas Akademisi dan lembaga riset dalam rangka PPPA	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Lainnya untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Lombok Tengah pada tanggal 24 Agustus 2020 - Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Bantuan Pemerintah Lainnya untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dalam rangka Percepatan Penangan Covid-19 tgl 23-25 Agustus 2020 - Fasilitasi Sinergi Lembaga Masyarakat dalam rangka PPPA, di Jakarta, tanggal 24 Agustus 2020 - Fasilitasi Sinergi Akademisi/Lembaga Riset dalam Rangka PPPA Bersama Forum PUSPA (Kalimantan) tgl 12 september 2020 - Fasilitasi Sinergi Akademisi/Lembaga Riset dalam Rangka PPPA Bersama Forum PUSPA (Provinsi Aceh) tgl 21 September 2020 - Fasilitasi Sinergi Akademisi/Lembaga Riset dalam rangka PPPA Bersama Forum PUSPA (Kalsel) tgl 16 September 2020 - Fasilitasi Sinergi Akademisi/Lembaga Riset dalam rangka PPPA bersama Forum PUSPA Kalsel, tgl 19 Sep 2020 - Fasilitasi Sinergi Akademisi/Lembaga Riset dlrk PPPA Bersama Forum PUSPA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
							<p>Sumut di Binjai, 24 Sep 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Sinergi Akademisi/Lembaga Riset dlrk PPPA Bersama Forum PUSPA Sumut di Medan Belawan, 25 Sep 2020 - Fasilitasi Sinergi Akademisi/Lembaga Riset dlrk PPPA Bersama Forum PUSPA Sumut di Medan Sunggal, 26 Sep 2020 - Fasilitasi Sinergi Akademisi/Lembaga Riset drk PPPA Bersama Forum PUSPA Kalsel, 26 September 2020 - Fasilitasi Sinergi Akademisi/Lembaga Riset drk PPPA Bersama Forum PUSPA Bengkulu, 30 September 2020 - PELAKSANAAN PENYEDIAAN BANTUAN PEMERINTAH LAINNYA UNTUK PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DLRK PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI DESA KAWO, LOMBOK TENGAH - Fasilitasi Bantuan Pemerintah Lainnya untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan drk. Percepatan Penanganan Covid-19, tanggal 28-30 September 2020 di Padang Sumatera Barat
6.	KIE tentang PP dan PA bagi kademisi/Lembaga Riset	-	-	3	-	Tersedianya Buku Panduan PTRG dan Roll up banner yang didistribusikan kepada Perguruan Tinggi di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Roll up Banner Indikator PTRG di bulan juli - Cetakan Buku Panduan PTRG di bulan juli - Pengadaan Roll Up Banner tentang anak-anak belajar dari kehidupan mereka di bulan juli

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT	KEGIATAN
		I	II	III	IV		
7.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA pada Akademisi/Lembaga Riset	-	-	1	-	Terpantau dan terevaluasinya pelaksanaan penguatan kelembagaan PUG dan PUHA pada organisasi keagamaan.	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA pada Akademisi/Lembaga Riset di Padang, tanggal 28-30 September 2020 di Padang Sumatera Barat
8.	Penguatan Peran Akademisi/ Lembaga Riset melalui penerapan Model Sinergi	-	-	1	-	Terlaksananya penguatan peran Akademisi/Lembaga Riset melalui penerapan model sinergi.	- Penguatan Peran PSW/PSG/A dlm Upaya Penerapan Kampus Responsif Gender (Loka Latih tentang Psychological First Aid) tgl 25-28 Agustus 2020

LAMPIRAN - III

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI PARTISIPASI LEMBAGA PROFESI DAN DUNIA USAHA

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			VOL	REALISASI	% CAPAIAN	HASIL/OUTPUT	KETERANGAN
1.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	1. Jumlah dunia usaha yang berperan serta dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	30 Dunia Usaha	28 Dunia Usaha	94%	unia usaha turut berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan serta memberikan bantuan berupa kebutuhan spesifik perempuan dan anak	
2.	Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	2. Jumlah lembaga profesi dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	12 Lembaga	15 Lembaga	125%	Terbentuknya persamaan persepsi dan komitmen yang kuat serta adanya partisipasi dari Lembaga Profesi untuk mendukung program Kemen PPPA dalam upaya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.	
3.	Pencegahan perkawinan anak	3. jumlah lembaga profesi, media serta organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan pencegahan perkawinan anak	6 Lembaga	9 Lembaga	125 %	Tersedianya Sarana Komunikasi, Edukasi, dan Informasi terkait Pencegahan Perkawinan Anak.	
4.	Meningkatnya partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam PPPA	4. Jumlah Kebijakan mendorong peningkatan partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usah	1 Kebijakan	-	-	-	Tidak ada kebijakan baru yang dihasilkan.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			VOL	REALISASI	% CAPAIAN	HASIL/OUTPUT	KETERANGAN
							Asdep LPDU hanya melakukan revisi kebijakan: 1. Revisi terkait Pedoman PPPA untuk Lembaga Profesi dan 2. Revisi untuk Panduan CSR Ramah Perempuan dan anak
		5. Jumlah Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang di fasilitasi dalam PUG dan PUHA	12 Lembaga	15 Lembaga	125%	Ada 15 Lembaga profesi yang mendapatkan penguatan isu PUG dan PUHA	
		6. Jumlah Provinsi yang melakukan sinergi program dan kegiatan di lembaga profesi dan dunia usaha dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	12 Provinsi	12 Provinsi	100%	Ada 12 Puspa di Provinsi yang merupakan wilayah binaan Asdep Partisipasi Lembaga profesi dan Dunia Usaha	
		7. Jumlah inovasi sebagai hasil sinergi program dan kegiatan lembaga profesi	7 Inovasi	-	-	Tidak ada program terkait inovasi yang dilaksanakan. Selain terkendala refofusing	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			VOL	REALISASI	% CAPAIAN	HASIL/OUTPUT	KETERANGAN
		dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan				anggaran guna Pandemi Covid-19, juga dikarenakan karena adanya Pandemi Covid-19	

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI PARTISIPASI LEMBAGA MEDIA

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			VOL	REALISASI	% CAPAIAN	HASIL/OUTPUT	KETERANGAN
1.	Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Jumlah lembaga media yang berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	6 Lembaga	6 Lembaga	100 %	Media dapat mensosialisasikan melalui pemberitaan tentang pentingnya unsur masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	
2.	Pencegahan perkawinan anak	2. jumlah lembaga media yang melakukan pencegahan perkawinan anak	6 Lembaga	6 Lembaga	100 %	Media dapat mensosialisasikan melalui pemberitaan tentang pentingnya unsur masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak	
3.	Meningkatnya partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam PPPA	3. Jumlah Lembaga media yang di fasilitasi dalam PUG dan PUHA	10 Lembaga	10 Lembaga	100 %	Terlatihnya SDM media Tentang PUG dan PUHA	
		4. Jumlah lembaga medis yang terlibat dalam forum LM dalam peningkatan PPPA	60 Lembaga	60 Lembaga	100 %	Adanya Kerjasama antara Media dengan forum LM dalam melaksanakan kegiatan issue PP dan PA	
		5. Jumlah Provinsi yang melakukan sinergi program dan kegiatan di lembaga media dalam peningkatan	10 Provinsi	8 Provinsi	80 %	Adannya pelaksanaan tugas Bersama antara LM dalam menuntaskan issue perempuan dan anak	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			VOL	REALISAS I	% CAPAIAN	HASIL/OUTPUT	KETERANGAN
		pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.					

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI PARTISIPASI ORGANISASI AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			VOL	REALISASI	% CAPAIAN	HASIL/OUTPUT	KETERANGAN
1.	Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Jumlah organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan Akademi/Lembaga Riset yang berpartisipasi dalam percepatan penurunan kekerasan melalui pencegahan	27 Lembaga	27 Lembaga	100%	<ul style="list-style-type: none"> - tersosialisasinya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada seluruh organisasi keagamaan, kemasyarakatan, akademisi/lembaga riset - meningkatnya pemahaman dan pengetahuan dalam upaya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan - tereduasinya pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. 	
2.	Pencegahan perkawinan anak	2. jumlah organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan pencegahan perkawinan anak	10 Lembaga	10 Lembaga	100%	<ul style="list-style-type: none"> - tersosialisasinya isu perkawinan anak kepada seluruh organisasi keagamaan - meningkatnya pemahaman dan pengetahuan organisasi perempuan terhadap upaya pencegahan perkawinan anak; dan - tereduasinya pemahaman organisasi keagamaan tentang bahaya perkawinan anak. 	
3.	Meningkatnya partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam PPPA	3. Jumlah Kebijakan partisipasi organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan Akademi/Lembaga Riset dalam PPPA	3 Kebijakan	3 kebijakan	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Panduan Strategi Lembaga Keagamaan dalam Pencegahan kekerasan Berbasis Gender dan Praktik Berbahaya bagi Perempuan dan Anak. - Tersusunnya Pedoman 	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			VOL	REALISASI	% CAPAIAN	HASIL/OUTPUT	KETERANGAN
						Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Situasi Bencana - Tersusunnya Panduan Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di Perguruan Tinggi	
		4. Jumlah organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan Akademisi/Lembaga Riset yang di fasilitasi dalam PUG dan PUHA	27 Lembaga	27 Lembaga	100%	Terfasilitasinya program dalam rangka PPPA bagi organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan Akademisi/Lembaga Riset	
		5. Jumlah Provinsi yang melakukan sinergi program dan kegiatan di organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dan Akademisi/Lembaga Riset dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	11 Provinsi	11 Provinsi	100%	Terciptanya sinergitas program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di 11 provinsi.	
		6. Jumlah inovasi sebagai hasil sinergi program dan kegiatan lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan	8 Inovasi	8 Inovasi	100%	1. Desa Wisata Ramah Anak (Sumatera Utara) 2. Inovasi Teh Beras Merah (Bali) 3. Kerajinan bambu dalam menuju Desa Wisata Ramah Anak (Bali) 4. Pembuatan bahan Upakara 5. Pembuatan Dupa (Bali)	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			VOL	REALISASI	% CAPAIAN	HASIL/OUTPUT	KETERANGAN
						6. Wisata jamu Tradisional (Riau) 7. Budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 8. Pembuatan Bank Sampah	

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			VOL	REALISASI	% CAPAIAN	HASIL/OUTPUT	KETERANGAN
1.	Meningkatnya layanan kesekretariatan dan layanan perkantoran Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	1. Presentasi perencanaan program, anggaran, pelaporan dan manajemen kinerja dan SDM yang sesuai standar	100%	100%	100%	1. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 2. RKA-KL Tahun 2021 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 4. Laporan Kinerja (Lakip) Tahun 2020	
		2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana operasional Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%	1. Sewa Mobil, Mesin fotocopy 2. Pemeliharaan sarana/prasarana 3. Pengelolaan anggaran	

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

ASDEP LPDU



Kegiatan pelatihan kuliner di Provinsi NTB



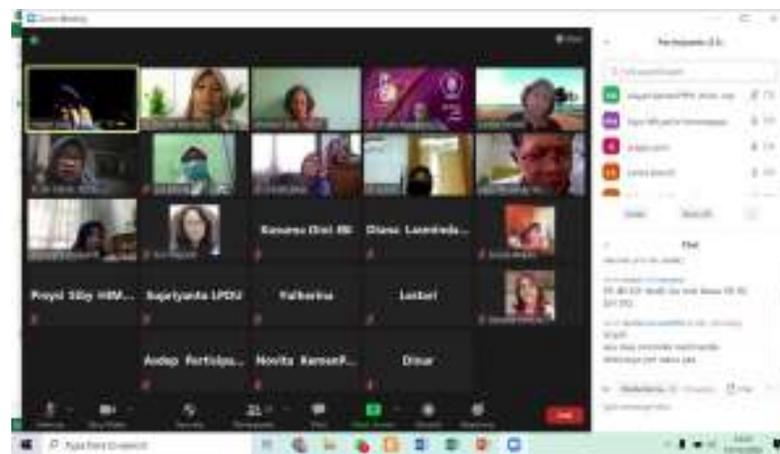
Kegiatan pelatihan kuliner bagi penyintas banjir di Kab Lebak, Provinsi Banten



Kegiatan pelatihan menjahit, memasak, hidroponik, pertukangan, dan manajemen usaha di Kab Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan



Kegiatan pelatihan menjahit, memasak, hidroponik dan manajemen usaha di Provinsi Aceh



Kegiatan webinar dengan 15 lembaga profesi anggota prosapena